

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERANAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM  
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PEKAN ARBA  
KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Sosial Dan Politik  
Universitas Islam Riau*



**ERISKA KANZA  
167310004**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2020**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang maha kuasa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Adapun judul Skripsi yakni “Peran Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)” tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku Rektor Universitas islam riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu sosisal & politik UIR.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si Selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, semoga ditangan Bapak lahir kader-kader yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP., M. Si Selaku Ketua Prodi dijurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik

- (FISIPOL) Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang telah memberikan masukan dari awal permulaan judul Usulan Penelitian.
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Usulan Penelitian ini.
  5. Kepada Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau.
  6. Kepada seluruh Staf karyawan TU Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.
  7. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
  8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin...

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, November 2020

Penulis

**Eriska Kanza**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Keguan Penelitian .....	16
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Teori Pemerintahan .....	17
a. Pengertian Ilmu Pemerintahan .....	17
b. Fungsi Ilmu Pemerintahan .....	21
c. Tujuan Ilmu Pemerintahan.....	22
2. Teori Manajemen .....	23
a. Pengertian Manajemen.....	23
b. Fungsi-Fungsi Manajemen.....	25
3. Teori Peran .....	34
a. Pengertian Peran .....	34
b. Dimensi Peran .....	35
4. Teori Pemberdayaan Masyarakat .....	36
a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .....	36

b. Prinsip-prinsip pemberdayaan Masyarakat .....	38
c. Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat .....	39
d. Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat .....	40
5. Konsep Pemerintah Kelurahan.....	42
6. Tinjauan Umum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga .....	44
B. Penelitian Terdahulu .....	44
C. Kerangka Pikir.....	46
D. Konsep Operasional .....	48
E. Operasionalisasi Variabel.....	51
F. Teknik Pengukuran .....	52
 <b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian .....	56
C. Populasi dan Sampel .....	56
D. Teknik Penarikan sampel .....	58
E. Jenis dan Sumber data .....	58
F. Teknik Pengumpulan data.....	59
G. Teknik Analisis data.....	61
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	61
 <b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1 Profil Kabupaten Indragiri Hilir .....	63
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Indragiri Hilir.....	63
4.2 Deskripsi Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir .....	65
4.2.1 Sejarah Kecamatan Tembilahan .....	65
4.2.2 Profil Kecamatan Tembilahan.....	66
a. Geografis Kecamatan Tembilahan.....	66
b. Keadaan Alamnya.....	67
c. Iklim Alamnya .....	67
d. Penduduk .....	67
e. Motto Kecamatan Tembilahan.....	69
f. Visi dan Misi Kecamatan Tembilahan .....	69
4.3 Kelurahan Pekan Arba.....	70
4.4 Struktur Organisasi.....	72
 <b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden .....	75
1. Jenis Kelamin Responden .....	76
2. Unsur Responden .....	76

3. Tingkat Pendidikan Respoden.....	77
B. Hasil Penelitian Tentang Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).....	78
1. Indikator Pengembangan berbasis masayarkt .....	79
2. Indikator Keberlanjutan .....	85
3. Indikator Partisipasi Masyarakat.....	91
4. Pengembangan Modal Sosial Masyarakat .....	96
5. Penghapusan Ketimpangan Gender .....	101
C. Hambatan-hambatan di hadapi Rekapitulasi Unsur Lurah Dalam Memberikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).....	110
 <b>BAB VI : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	113
 <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	114

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>halaman</b>
1.1	: Data Jumlah Penduduk Kelurahan Pekan Arbak Tahun 2014-2019.....	8
1.2	: Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan Pekan Arba	11
2.1	: Perbedaan Penelitian Penulisan dengan Penelitian Terdahulu .....	45
2.2	: Operasional Variabel Tentang Peranan Lurah dalam Memberdayakan PKK di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir .....	51
3.1	: Jumlah Populasi dan Sampel Peran Lurah dalam Memberdayakan PKK di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir .....	57
3.2	: Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) .....	62
4.1	: Jumlah Rumah Tangga (RT) Dan Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Tembilahan Tahun 2019 .....	68
4.2	: Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Tembilahan Tahun 2019 .....	68
5.1	: Jenis Kelamin Penelitian Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) .....	76
5.2	: Umur Respoden Berdasarkan Usia Termuda dan Usia Tertua.....	77
5.3	: Tingkat Pendidikan Responden Penelitian Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten	

	Indragiri Hilir (Studi Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) .....	78
5.4	: Penelitian Responden Unsur Kelurahan Tentang Indikator Pengembnagan berbasis masyarakat pada penelitian Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) .....	80
5.5	: Penelitian Responden Unsur PKK tentang Indikator Pengembnagan berbasis masyarakat pada penelitian Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) .....	82
5.6	Hasil observasi tentang kegiatan PKK di Kelurahan Pekan Arba ..	84
5.7	: Penelitian Responden Unsur Kelurahan Tentang Indikator Keberlanjutan pada penelitian Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) .....	86
5.8	: Penelitian Respoden Unsur PKK Tentang Indikator Keberlanjutan pada penelitian Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) .....	88
5.9	Hasil observasi tentang kegiatan PKK di Kelurahan Pekan Arba...	90
5.10	: Penelitian Respoden Unsur Kelurahan Tentang Indikator Partisipasi Masyarakt pada penelitian Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) .....	91
5.11	: Penelitian Responden Unsur PKK Tentang Indikator Partisipasi Masyarakat Pada Penelitian Peranan Lurah Dalam	

	Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) .....	94
5.12	Hasil observasi tentang kegiatan PKK di Kelurahan Pekan Arba...	96
5.13	: Penelitian Responden Unsur Kelurahan Tentang Indikator Pengembangan Modal sosial masyarakat Pada Penelitian Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) .....	97
5.14	: Penelitian Responden Unsur PKK Tentang Indikator Pengembangan modal sosial masyarakat pada penelitian Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) .....	99
5.15	Hasil observasi tentang kegiatan PKK di Kelurahan Pekan Arba...	101
5.16	: Penelitian Responden Unsur Kelurahan Tentang Indikator Penghapusan Ketimpangan gender pada penelitian Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) .....	102
5.17	: Penelitian Responden Unsur PKK Tentang Indikator Penghapusan Ketimpangan gender pada penelitian Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) .....	104
5.18	Hasil observasi tentang kegiatan PKK di Kelurahan Pekan Arba...	106
5.19	: Rekapitulasi Unsur Lurah Dalam Memberikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) .....	107

5.20 : Rekapitulasi Unsur PKK Dalam Memberikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)..... 109



## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikir Tentang Peranan Lurah dalam Memberdayakan PKK di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir .....	47
4.1	Struktur organisasi pemerintah kelurahan pekan arba kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir .....	74

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuisisioner .....	117
Lampiran 2 : Kuisisioner .....	125
Lampiran 3 : Wawancara .....	133
Lampiran 4 : Data Telly .....	134
Lampiran 5 : Dokumentasi .....	135
Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Plagiasi .....	139
Lampiran 6 : Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tembilahan Kelurahan Pekan Arba .....	142

## SURAT PERYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eriska Kanza  
NPM : 167310004  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Desember 2020  
Pelaku Pernyataan

Eriska Kanza

**PERANAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM  
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PEKAN ARBA  
KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**ABSTRAK**

Eriska Kanza

167310004

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di alami oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Indikator penilaian Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang digunakan meliputi Pengembnagan berbasis masyarakat, keberlanjutan, partisipasi masyarakat, pengembangan modal sosial masyarakat dan penghapusan ketimpangan gender. Tipe penelitian yang berlokasi di Kelurahan Pekan Arba kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian penelitian ini adalah Survey deskriptif metode kuantitatif yaitu Berangkat dari data, catatan lapangan, observasi, kuisoner, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Populasi dan Sampel penelitian ini berjumlah Dua puluh satu, Lurah, Sekretaris, Staff 3 orang, ketua PKK, dan kader PKK 15 orang. Jenis pengumpulan data terdiri dari data primer, data sekunder, struktur organisasi pemerintah Lurah Pekan Arba. Sementara teknis analisa data diperjelas dengan hasil Observasi, kuisioner, wawancara, dokumentasi, data tersebut diolah dan dianalisis untuk menjelaskan tujuan penelitian, kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan judul peneliti untuk diambil kesimpulan bahwa Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam kategori Cukup Baik.

*Kata Kunci : Peran, Kelurahan, Lembaga*

**THE ROLE OF FAMILY EMPOWERMENT IN EMPOWERING  
COMMUNITY IN PEKAN ARBA VILLAGE, TEMBILAHAN DISTRICT,  
INDRAGIRI DISTRICT, HILIR**

**ABSTRACT**

*Eriska Kanza*

167310004

*This study aims to determine the Role of Empowering Family Welfare in Empowering Communities in Pekan Arba Village, Tembilahan District, Indragiri Hilir Regency and to determine the obstacles experienced by Empowering Family Welfare in Empowering Communities in Pekan Arba Village, Tembilahan District, Indragiri Hilir Regency. The indicators for assessing the Role of Family Welfare Empowerment in Empowering Communities in Pekan Arba Village, Tembilahan District, Indragiri Hilir Regency, which are used include community-based development, sustainability, community participation, development of community social capital and eliminating gender inequality. This type of research is located in Pekan Arba Village, Tembilahan Subdistrict, Indragiri Hilir Regency, then this research is a descriptive survey with quantitative methods, namely departing from data, field notes, observations, questionnaires, interviews and documentation as data collection tools. The population and sample of this study were two to one, the head of the village, the secretary, 3 staff members, the head of the PKK, and 15 PKK cadres. Types of data collection consist of primary data, secondary data, and the organizational structure of the Pekan Arba Urban Village government. While the technical data analysis is clarified with the results of observations, questionnaires, interviews, documentation, the data is processed and analyzed to explain the research objectives, then compared with the theories related to the title of the researcher to conclude that the Role of Empowering Family Welfare in Empowering Communities in Kelurahan Pekan Arba, Tembilahan District, Indragiri Hilir Regency, is in the Fairly Good category.*

*Keywords: Role, Kelurahan, Institution*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Keberadaan Indonesia sebagai suatu Negara, tentunya tidak terlepas dari konsep bernegara itu sendiri. Sebagai Negara Kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan.

Didalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang mempunyai peranan penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Di dalam pencapaiannya, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik dan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa. Seperti halnya tujuan pembangunan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain itu fokus pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah lebih diberdayakan

sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pada hakekatnya upaya untuk memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat diperlukan agar dapat memaksimalkan potensi diri dan lingkungannya. Upaya ini diperlukan agar masyarakat dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan serta mampu menghadapi masalah yang dihadapi melalui pemilihan alternatif solusi dengan mandiri. Wujud nyata yang akan dihasilkan adalah terbentuknya keberdayaan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi keberdayaan tersebut, istilah pemberdayaan pun semakin akrab menjadi bagian dari realitas kehidupan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat yang tinggal di desa atau semi kota. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan (power) yang akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan (Widjajanti 2011). Selanjutnya pemberdayaan ini adalah transformasi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang diberikan melalui beberapa kegiatan. Cakupan kegiatan tersebut dapat berupa bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan (Mardikanto 2010). Tidak hanya kegiatan yang dilakukan menjadi poros pemberdayaan, namun partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan mempunyai pengaruh signifikan.

Pada umumnya pembangunan merupakan suatu upaya perubahan yang dilakukan secara terencana melalui tahapan pembangunan yang tujuannya yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Paradigma pembangunan baru menganggap bahwa pembangunan seharusnya dilakukan atas inisiatif dan dorongan dari masyarakat, jadi masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam seluruh proses pembangunan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pembangunan Desa atau Kelurahan merupakan pendukung utama keberhasilan pembangunan nasional dimana yang kita ketahui sebagian besar masyarakat Indonesia ada didesa dengan berbagai profesinya, jadi sudah kewajiban bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan, mengontrol lingkungannya dan dapat memenuhi

keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya dengan mandiri. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan, dari sisi inilah masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah serta peluang pembangunan mereka sendiri.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan bahwa Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dengan berlandaskan prinsip pengelolaan pembangunan yang partisipatif, pada lingkup pemerintah menghadirkan pemerintahan yang jujur, adil, demokratis dan bertanggung jawab begitupun pada tatanan masyarakat mereka dilibatkan dalam dalam proses pembangunan seperti pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 Pasal 12, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;

2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
4. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
7. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
8. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
9. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
10. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 Pasal 5

dalam melaksanakan tugas pokok lurah mempunyai tugas yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Salah satu peranan penting pemerintah desa atau kelurahan yaitu dapat menjalankan fungsinya memberdayakan masyarakat. Namun secara umum dalam kenyataannya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dimana penilaian kinerja pemberdayaan pemerintah pada masyarakat terkesan sebagai formalitas belaka, tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat menerima begitu saja pembangunan desa yang dijalankan sehingga sumber daya mereka tidak berkembang, Musrenbang desa atau kelurahan sebagai bagian pemberdayaan sumber daya masyarakat hanya sekedar tuntutan tugas semata.

Oleh karena itu peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sangat penting demi kelancaran pembangunan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan untuk kepentingan bersama.

Pemberdayaan adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh berbagai pihak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, lahir dan batin. Seyogyanya upaya pembinaan dan pemberdayaannya adalah tanggung jawab kita bersama, maka diperlukan sebanyak mungkin kader-kader PKK yang

mau dan mampu memberikan pencerahan kepada keluarga dan masyarakat agar dapat dipahami dan dilaksanakan kegiatan yang pada hakikatnya adalah merupakan peningkatan kualitas aktivitas masyarakat pada umumnya, dan mewujudkan keluarga sejahtera pada khususnya.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Mekanisme gerakan PKK yang bersifat hirarkis, koordinatif, konsultatif, universal dan independen dari pusat sampai ke Kelurahan. Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagai mitra kerja pemerintah Kelurahan juga sebagai perencana, pelaku dan pembina serta pengendali program PKK di tingkat Kelurahan senantiasa mengusahakan agar dapat melakukannya dengan sebaik mungkin, sebagai motivator dan juga penggerak PKK di tingkat di bawahnya agar Kelompok PKK RW,RT,dan DasaWisma dapat mengelola dan melaksanakan kegiatan PKK dengan sebaik-baiknya, dalam rangka mencapai tujuan seperti yang tertuang pada Visi dan Misi PKK.

PKK memiliki beberapa program untuk membantu ibu-ibu pada khususnya untuk mendapatkan pelajaran dan pelatihan yang nantinya pelajaran itu bisa diterapkan di keluarganya serta pelatihan-pelatihan yang hasil akhirnya berbentuk kerajinan atau olahan makanan yang akan diperjualbelikan sehingga akan mendapatkan keuntungan yang nantinya berdampak pada perekonomian keluarganya. PKK membuat program-program yang mengarah kepada

kemandirian para perempuan di desanya, dikutip dari berita resmi website Pemerintah, Berdasarkan analisis dan data tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K).

Kelurahan Pekan Arbak merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di wilayah kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Luas wilayah Kelurahan Pekan Arbak seluas 19.11 Km dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.115 orang. Kelurahan Pekan Arbak memiliki 15 RT dan 4 RW. Berdasarkan dari data penduduk kelurahan Pekan Arbak, masyarakat kelurahan Pekan Arbak mayoritas bekerja sebagai pekerja buruh dan pedagang. Banyak masyarakat kelurahan Pekan Arbak yang tidak memiliki potensi dan keterampilan. Melihat kondisi tersebut pemberdayaan sangat perlu dilakukan agar masyarakat di kelurahan Pekan Arbak lebih berdaya guna dan dapat memanfaatkan potensinya dalam mengolah sumber daya yang ada untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut adalah data jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Pekan Arbak:

**Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Kelurahan Pekan Arbak Tahun 2014-2019**

No	Tahun	Jumlah Penduduk (KK)
1	2014	80
2	2015	82
3	2016	86
4	2017	90
5	2018	92

*Sumber: Kelurahan Pekan Arba, 2020*

Kelurahan Pekan Arbak memiliki organisasi kemasyarakatan kelurahan yaitu PKK. Pada saat ini program pokok PKK kelurahan Pekan Arbak sudah berjalan cukup baik dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, namun di sisi lain, dilihat dari sumber daya manusia yang tersedia belum semuanya

mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk menerapkan, menjalankan, serta membimbing masyarakat. Faktor lain yang menjadi permasalahannya juga karena banyak anggota yang tidak mau melibatkan diri atau berpartisipasi didalam Program ini. Misalnya mereka lebih sering diam di dalam rumah dari pada harus keluar dan mengikuti sejumlah kegiatan yang sudah di siapkan oleh tim PKK. Di sisi lain, motivasi yang kurang dari pemerintah dan tim PKK sehingga membuat masyarakat pun malas dan tidak mau untuk untuk melibatkan diri dalam program PKK.

PKK Kelurahan Pekan Arbak mempunyai program pemberdayaan masyarakat salah satu programnya ialah dalam bentuk pemberdayaan keterampilan yang terdapat dalam Program Pokok PKK. Tujuan yang diharapkan dengan adanya program pemberdayaan keterampilan ini adalah peningkatan kesejahteraan keluarga dari segi ekonomi, pendidikan, serta kehidupan sosial pada masyarakat Kelurahan Pekan Arbak. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan keterampilan, masyarakat kelurahan Pekan Arbak dilatih untuk dapat terampil, berpotensi dan mampu mengembangkan sumber daya yang ada.

Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan Pasal 18 menjelaskan bahwa tugas PKK adalah:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
2. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK

Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;

3. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
4. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
5. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
6. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
7. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
8. Melaksanakan tertib administrasi; dan
9. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 18 Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
2. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) memiliki sepuluh program PKK yaitu Penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat. Kegiatan PKK merupakan bagian dari pembangunan nasional yang terus menerus selaras dengan dinamika pembangunan. Kegiatan PKK di daerah merupakan bagian integral dari kegiatan PKK secara nasional, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu di setiap Propinsi, Kabupaten/Kota. Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai kelompok-kelompok PKK dan Dasawisma. Gerakan PKK tetap memelihara hubungan konsultatif, koordinatif dengan tetap memperhatikan hirarki di seluruh jenjang TP PKK. Sistem perencanaan dimulai dari bawah (bottom-up planning system). Hal ini menjadi ikatan yang kuat antar semua jajaran Gerakan PKK dari pusat sampai kelompok – kelompok Dasawisma. Peranan PKK dalam melaksanakan programnya mempunyai kebijakan, strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.

Adapun Gambaran Umum Tim Penggerak PKK Kelurahan Pekan Arba sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Sususan Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan Pekan Arba**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
01	Ny. Hj. Anita Ismail	Ketua	
02	Ny. Lisa Anggraini, S.Pd	Wakil Ketua	
03	Ny. Ria Trisnanti	Bendahara I	
04	Ny. Ermilius	Bendahara II	
05	Ny. Agustina, Se	Sekretaris I	
06	Nn. DEVI JUNIARTI, S.Pd	Sekretaris II	

1	2	3	4
07	Ny. Aisyah Gunawan	Ketua Pojok. I	Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dan Gotong Royong
08	Ny. Ariani	Sekretaris	
09	Ny. Sri Hildayani	Anggota	
10	Ny. Yusdiana	Anggota	
11	Ny. Elyani	Ketua Pojok. Ii	Pendidikan Dan Keterampilan Dan Pengembangan Kopeasi
12	Ny. Samiati	Sekretaris	
13	Ny. Nurul Hasanah	Anggota	
14	Ny. Sri Asniwati	Anggota	
15	Ny. Zubaidah	Anggota	
16	Ny. Dina	Ketua Pojok. III	Sandang, Pandang Dan Tata Laksana Rumah Tangga
17	Ny. Nurhikmah	Sekretaris	
18	Ny. Novetry Bakhtiar	Anggota	
19	Ny. Neneng	Anggota	
20	Ny. Masitah	Dokumen	
21	Ny. Faridah, Amd Keb	Ketua Pojok. IV	Kesehatan, Lingkungan Hidup Dan Perencanaan Sehat
22	Ny. Luluk Mahmudah	Sekretaris	
23	Ny. Rosati	Anggota	
24	Ny. Kusniati	Anggota	
25	Ny.Nugayah	Anggota	

Sumber : Kelurahan Pekan Arba 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan PKK secara terpadu dilaksanakan oleh pokja-pokja dengan berpedoman pada 10 program pokok PKK. Melihat situasi dan kondisi masyarakat yang berada di Desa Ratna Chaton, kondisi masyarakat mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Suami maupun istri bekerja di sawah, sang istri hanya membantu suami di sawah atau bekerja di sawah sebagai buruh. Setelah selesai pekerjaan di sawah para ibu hanya di rumah saja tidak

memiliki kegiatan dan tidak memiliki pendapatan lain dan ada sebagian masyarakat yang menganggur. Masyarakat Desa Ratna Chaton hanya mengandalkan hasil panen saja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan panen dalam setahun 2-3 kali panen, jika musim peceklik datang masyarakat mengalami kekurangan atau krisis (untuk yang mempunyai sawah sedikit) atau yang bekerja jadi buruh tani. Masyarakat Desa Ratna Chaton ibu rumah tangganya kebanyakan berpendidikan tingkat SD, SMP, jadi pengetahuan mereka masih rendah tidak bisa mengembangkan SDM yang mereka miliki. Padahal jika mereka berpengetahuan luas mereka dapat memanfaatkan SDM mereka.

Upaya PKK yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi rumah tangga Muslim termasuk ke dalam pokja II yaitu pendidikan dan keterampilan, program UPPK, pengembangan kehidupan berkoperasi. Di Kecamatan Tembilihan yaitu di Kelurahan Pekan Arbak adalah Desa yang masyarakat nya Muslim yang berusaha untuk menggerakkan partisipasi masyarakatnya dengan melibatkan wadah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kelurahan Pekan Arbak menjadi salah satu desa yang ada dikecamatan Tembilihan yang terus melaksanakan program PKK, dan terus memberdayakan perempuan lewat program di dalamnya, dengan tujuan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat desa. Lewat program-program yang dilaksanakan oleh PKK di D Kelurahan Pekan Arbak, peneliti lebih menitik beratkan pada program pemberdayaan ekonomi yang ada dalam program PKK, yaitu termasuk ke dalam pokja II mengelola program pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPK)

Dalam Pokja II didalamnya terdapat program peningkatan pendapatan keluarga (UP2K). Program UP2K adalah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Cara pengembangan usaha perkembangan UP2K adalah dengan pengguliran dana dan penambahan modal usaha, mengupayakan pemasaran UP2K PKK melalui pasar, warung, ikut pada pameran, bazar baik lokal maupun nasional dan menjalin kemitraan dengan Dekranas/Dekranasda, memotivasi keluarga agar mau menjadi anggota koperasi untuk meningkatkan pendapatan keluarga.<sup>12</sup> Program pemberdayaan ekonomi ini meliputi tahapan penyuluhan, pelatihan kewirausahaan, peminjaman modal usaha dan pengembangan usaha produktif rumah tangga, tahapan pengembangan dan pembinaan tenaga terampil yang dimiliki keluarga dan tahapan pembentukan kelompok sosial serta pengamalan fungsi keluarga sejahtera. Artinya bahwa disamping dilakukan pengembangan kreativitas SDM juga ditumbuhkan kemampuan untuk mengelola usaha-usaha industri rumah tangga.

Dari pemberdayaan PKK tersebut dapat dilihat fenomena yaitu:

1. Kurang mencapai dukungan masyarakat misalnya suatu program yang diadakan oleh PKK banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi untuk melaksanakan dengan baik.
2. Keberlanjutan program PKK tidak jelas.
3. Adanya masalah berkaitan dengan program PKK yang tidak terlaksana dengan baik.

Berdasarkan Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 seharusnya PKK memiliki fungsi yang jelas. Akan tetapi PKK yang ada di

Kelurahan Pekan Arbak terdapat permasalahan berkaitan fungsinya yang belum menunjukkan atau belum produktif bagi PKK itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi di Kelurahan Pekan Arbak menjelaskan bahwa :

1. Belum berhasilnya berkaitan PKK dalam menggali potensi sumberdaya manusia, serta keahlian sudah relative maju.
2. Belum banyak capaian dari PKK dibandingkan dengan PKK lain.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa masih kurang maksimalnya kelurahan dalam meningkatkan PKK yang ada di Desa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitiannya adalah : **“Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ?”
2. Hambatan-hambatan apa yang di alami oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di alami oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi negara, khususnya manajemen.
- b. Kegunaan akademis yaitu penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan untuk peneliti berikutnya dengan tujuan terkait dan juga sebagai masukan untuk kader PKK Pekan Arba
- c. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Adapun sebagai bahan acuan penulis mengangkat judul penelitian “Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”, maka berikut penulis kemukakan beberapa konsep ataupun teori-teori yang mendukung serta yang berkaitan dengan variabel yang di teliti untuk memecahkan permasalahan yang akan penulis antara lain yaitu:

##### 1. Teori Pemerintahan

###### a. Pengertian Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Di dalam bahasa Inggris istilah pemerintahan dan pemerintah tidak memiliki perbedaan yang disebut dengan “*government*”. Istilah ini bersumber dari latin yaitu “*gubernaculum*” yang berarti kemudi. Kata *government* dapat bermakna, Melaksanakan wewenang pemerintahan dan cara atau system memerintah.

Pemerintahan adalah organization yang mana diletakkan hak pelaksanaan kekuasaan tertinggi atau berdaulat. Strong memandang pemerintahanlah yang mempunyai kekuasaan. Suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh

suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. Organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Menurut Syafie (2005;20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahan bagaimana melaksanakan melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2003;6), pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material Negara segara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara (Munaf, 2016:47)

Secara lebih tegas, Miftah Thoha (2007) di dalam Munaf (2016:8) bahkan mengatakan telah terjadi perubahan paradigma dari orientasi manajemen pemerintah yang serba Negara menjadi berorientasi ke pasar (market). Menurut Thoha, pasar di sini secara politik bisa dimaknai sebagai rakyat atau masyarakat (public).

Pada era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk suatu pembaharuan struktur birokrasi publik yang lebih desentralisasi dan tidak dilengkapi oleh banyaknya aturan organisasi dan prosedur yang berdefinisi dengan jelas (formalitas rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksanaan mendapat keleluasaan untuk melakukan diskripsi yang adaktif dengan perubahan yang ada.

Dengan demikian juga halnya dengan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah kecamatan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. Para birokrat sebagaimana administrator haruslah mempunyai moral dalam penyelenggaraan kegiatan administrasinya. Karena kegiatan ini dituntut untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, untuk mewujudkannya maka diperlukan sumber daya manusia dan para administrator itu sendiri.

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Di samping itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan

ilmu. Organisasi yang efektif dapat memberikan kontribusi dari kinerja organisasi pemerintah, demikian juga dengan penerapan pelayanan publik. Kemampuan organisasi dalam menerapkan sebuah peraturan baru dipengaruhi tiga hal pokok yaitu : struktur organisasi, personel dan finansial. Meskipun suatu kebijakan sudah dirumuskan dengan jelas dan memungkinkan untuk diimplementasikan dengan mudah akan tetapi masih berpeluang untuk gagal oleh kelemahan struktur organisasi dan kelembagaan sistem. Struktur yang ketat dan tersentralisasi akan mendukung kepatuhan. Jika semua dalam kondisi sama baik itu struktur dan sebagaimana keberhasilan implementasi nampak akan sangat tergantung pada karakter dari tujuan kebijakan itu sendiri, jumlah staf yang memadai, hali dan mempunyai motivasi tingkat akan mempermudah proses konversi pesan kebijakan menjadi realitas.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Serdamayanti (2004; 195)

Dengan demikian dalam pengertian sederhana dapat dijelaskan kembali bahwa Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber

pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara, mengenai rakyat dan Negara serta demi tujuan Negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi Negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan Negara. Sementara itu, tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah.

#### **b. Fungsi Ilmu Pemerintahan**

Menurut Soewarjono dan Djohan dalam Muhaddam Labolo (2011:37) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga Negara akan bersentuhan kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah memiliki peran yang penting dan menentukan. Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham (sumber-sumber) Negara, dimana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas Negara.

Rasyid (2000 : 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Oleh Ndraha (2001 : 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai providerjasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

### **c. Tujuan Ilmu Pemerintahan**

Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan

sebagaimana pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada, Musanef (1982:5).

Tujuan ilmu pemerintahan adalah:

1. Menghasilkan lulusan bidang pemerintahan yang memiliki kemampuan konseptual dan operasional yang memiliki sikap profesional, mengedepankan nilai etik, berintegritas, dan mampu beradaptasi terhadap kebutuhan global;
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan yang berorientasi pada pengembangan keilmuan dan pemecahan masalah-masalah bidang pemerintahan;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat di bidang Ilmu Pemerintahan yang berorientasi pada penguatan kelembagaan pemerintahan dan partisipasi publik;
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan swasta di dalam dan luar negeri yang berorientasi pada upaya membangun daya saing nasional, regional, dan internasional.

## 2. Teori Manajemen

### a. Pengertian Manajemen

Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakkan segala sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Karena itu dalam menjalankan suatu organisasi, segala macam aktifitas yang telah direncanakan sangat berkepentingan sekali dengan manajemen, dan manajemen sangat erat sekali kaitannya dengan kepemimpinan, peranan antar pribadi,

pemberi informasi dan pengambilan keputusan sehingga proses manajemen dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Sebagai alat pencapai tujuan, organisasi itu tidak boleh tinggal diam atau statis, melainkan harus bergerak melalui beberapa proses yang dinamakan manajemen, dengan kata lain bahwa manajemen itu merupakan penggerak dalam tubuh organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. menurut Salih bahwa manajemen adalah sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. (Salih, 1989: 9).

Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa manajemen itu merupakan suatu kemampuan dan keterampilan untuk mempengaruhi dan mengatur orang lain, diarahkan atau dikelompokkan kepada sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu, baik berupa sumber daya manusia atau sumber daya lainnya melalui tindakan-tindakan berantai dari mulai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dengan demikian diharapkan tujuan itu dapat dicapai dengan cepat, tepat serta sesuai dengan rencana. pengertian manajemen menurut, Melayu S.P. Hasibuan adalah :

*Management is a distinct process consisting of planing, organizing, actuating, and controling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being ang other resources.*

Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. (Hasibuan, 1995:3).

Berdasarkan penjelasan diatas, manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu.

G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam bahwa :

*Management is a distinct process consisting of planing, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed on order to accomplish predetermined objectives.*

Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Salam, 2004: 11).

Berdasarkan pendapat diatas, dapat di katakan bahwa manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu. Melalui pemanfaatan baik ilmu maupun seni seperti, kemampuan dan kemahiran dalam mengerjakan tugas-tugas, memiliki cita rasa yang tinggi dalam pembangunan segala sektor, dan mempunyai penampilan yang khas sebagai penguasa atau pemimpin. Oleh sebab itu sebagai inti manajemen dikenal istilah kepemimpinan, sedangkan sebagai inti kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Untuk melakukan serangkaian tindakan tersebut dapat diidentifikasi.

#### **b. Fungsi-Fungsi Manajemen**

Fungsi-fungsi manajemen yang berarti adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib,

efektif dan efisien. Menurut G.R. Terry yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam dalam bukunya *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (*POAC*) yaitu :

1. *Planning* (perencanaan).
  2. *Organizing* (pengorganisasian).
  3. *Actuating* (Penggerakan).
  4. *Controlling* (Pengawasan).
- (Salam, 2004:14)

Berdasarkan pendapat diatas, fungsi manajemen tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk merumuskan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. menurut, Dharma Setyawan Salam sebagai berikut :

Perencanaan adalah usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. (Salam, 2004:14).

Hal ini sejalan dengan pendapatnya Melayu S.P. Hasibuan bahwa :

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. (Hasibuan, 1995:95).

Berdasarkan penjelasan diatas, perencanaan adalah usaha untuk melakukan tindakan/pekerjaan dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan pada masa akan datang.

Jenis-jenis rencana itu ialah:

1. Kebijakan adalah pernyataan atau pengertian umum yang memberikan bimbingan berfikir dalam menentukan keputusan.
2. Anggaran adalah suatu ihtiar dari hasil yang diharapkan dan pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut dinyatakan dalam kesatuan uang.
3. Prosedur adalah suatu rangkaian tugas yang mewujudkan urutan waktu dan rangkaian yang harus dilaksanakan.

(Salam, 2004:15).

Bertolak ukur dari pendapat diatas, bahwa fungsi perencanaan ini mencakup juga penetapan alat yang sesuai untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Hasil yang diharapkan dari fungsi ini adalah kesepakatan tentang sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh anggota organisasi secara proposional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Ada beberapa keuntungan dalam perencanaan yaitu :

1. Dengan adanya perencanaan tujuan jelas, obyektif dan rasional.
2. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah, teratur dan ekonomis.
3. Perencanaan akan meningkatkan pendayagunaan semua fasilitas yang dimiliki.
4. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas teratur dan bermanfaat.
5. Perencanaan dapat memperkecil resiko.
6. Perencanaan memberikan landasan untuk pengendalian.
7. Perencanaan merangsang prestasi kerja.
8. Perencanaan memberikan gambaran mengenai seluruh pekerjaan dengan jelas dan lengkap.

(Hasibuan, 1995:111).

Keuntungan dalam perencanaan mempunyai tujuan yang jelas dan terarah dalam merumuskan sesuatu pekerjaan yang akan dilaksanakan sehingga hasil yang di inginkan sesuai dengan tujuan yang di rencanakan.

Ada beberapa syarat perencanaan yang baik adalah :

1. Merumuskan dahulu masalah yang akan direncanakan.
2. Perencanaan harus didasarkan pada informasi, data dan fakta.
3. Menetapkan beberapa alternatif.
4. Putuskanlah suatu keputusan yang menjadi rencana.

(Hasibuan, 1995: 112).

Perencanaan yang dilaksanakan dengan baik, maka akan dihasilkan suatu rencana yang baik dengan memperhatikan syarat-syarat perencanaan yang berdasarkan kesepakatan bersama.

Fungsi pengorganisasian/fungsi pembagian kerja berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun harus direncanakan. Pengertian Pengorganisasian dan organisasi berbeda. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan hal yang statis yang menggambarkan pola-pola, skema, bagan dan menunjukkan garis-garis perintah serta hubungan-hubungan yang ada. Organisasi hanya merupakan alat, dan wadah tempat seorang pemimpin melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hubungan Pengorganisasian dengan organisasi adalah hasil dari pengorganisasian yaitu apabila organisasi baik, maka organisasi pun akan baik dan tujuan pun relatif mudah dicapai.

Organisasi ini terdiri dari dua bagian dasar yaitu :

1. Bagian-bagian/departemen/devisi.
2. Hubungan-hubungan, yakni hubungan antar manusia, antar departemen yang harus ditetapkan dengan jelas dan tegas. (Hasibuan, 1995: 121).

Penetapan hubungan-hubungan ini merupakan salah satu syarat tercapainya kerja sama (*Team work*) antara pegawai. Pengorganisasian menurut para ahli sebagai berikut :

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan memerlukan aktifitas tersebut. (Hasibuan, 1995:123).

Berdasarkan pendapat diatas, pengorganisasian adalah kelompok orang yang bekerja sama, dengan adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan, serta adanya pendelegasian wewenang.

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai kegiatan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan dari penyediaan fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penyuluhan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan. (Salam, 2004:19).

Berdasarkan pendapat di atas, maka fungsi pengorganisasian ini meliputi semua kegiatan manajemen yang diwujudkan dalam struktur tugas dan wewenang. Pengorganisasian mengatur kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh unit-unit organisasi seperti pendelegasian wewenang untuk melaksanakan pekerjaan, hubungan informasi vertikal dan horizontal, dalam suatu koordinasi yang efektif dan efisien.

Ada beberapa tahap dalam proses pengorganisasian yaitu:

1. Penentuan kegiatan adalah seorang pimpinan harus mengetahui dan merumuskan kegiatan yang diperlukan serta menyusun daftar kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Pengelompokan kegiatan harus mengelompokkan kegiatan atas dasar tujuan yang sama, hal ini berdasarkan atas dasar proses atau peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan.
3. Pendelegasian wewenang adalah seorang pemimpin harus menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada bawahan. (Salam, 2004:19).

Setelah melakukan perencanaan dan pengorganisasian, tibalah saatnya untuk melaksanakan perencanaan dan pengorganisasian itu dengan menggerakkan seluruh sumberdaya yang telah direncanakan dan diorganisir untuk mencapai

tujuan organisasi. Karena tercapainya tujuan bukannya hanya tergantung kepada perencanaan dan pengorganisasian yang baik melainkan juga tergantung kepada penggerakan dan pengawasan. penggerakan menurut Melayu S.P. Hasibuan yaitu:

*Actuating is setting all members of the group toward to achieve the objective willingly and keeping with managerial planning and organizing efforts.*

Penggerakan adalah membuat semua kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. (Hasibuan, 1995:176).

Penggerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, mengarahkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian. Menurut Dharma Setyawan Salam yaitu :

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. (Salam, 2004:20).

Berdasarkan pendapat di atas, maka fungsi penggerakan dapat diartikan sebagai suatu usaha mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi (pegawai) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian penggerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, mengarahkan dan mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha.

Ada beberapa faktor dominan dalam menentukan keberhasilan pergerakan yaitu:

1. Motivasi adalah suatu keahlian seorang pemimpin dalam mengarahkan bawahannya agar tercapainya organisasi.
  2. Kepemimpinan adalah merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang di inginkan.
  3. Sikap dan moral seorang pimpinan dalam membina kerja sama, harus mampu memahami perilaku bawahannya.
  4. Komunikasi adalah informasi, pesan yang dikomunikasikan dapat dimengerti dan ditafsirkan sama oleh orang lain.
- (Salam, 2004:21).

Tahap terakhir adalah pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam rencana sebelumnya. Pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya kegiatan perencanaan dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan ini berkaitan erat sekali dengan perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena :

1. Fungsi pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan.
  2. Pengawasan hanya dapat dilakukan, jika ada perencanaan/rencana.
  3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan secara baik.
  4. Tujuan baru diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan dan pengukuran dilakukan.
- (Hasibuan, 1995: 222).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengawasan sangat menentukan baik/buruknya pelaksanaan suatu rencana. menurut Melayu S.P. Hasibuan adalah :

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan. menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. (Hasibuan, 1995:223).

Berdasarkan pendapat diatas, pengawasan adalah supaya proses pelaksanaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang rencana dan melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan supaya tujuan yang di hasilkan sesuai yang direncanakan. hal ini sejalan dengan pendapatnya Dharma Setyawan Salam yaitu :

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan panduan. (Salam, 2004:21).

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing, dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan berpedoman kepada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan. jika terdapat tindakan yang menyimpang dari standar yang telah ditetapkan maka diperlukan tindakan korektif/perbaikan sesuai dengan langkah, prosedur, dan ukurannya yang telah ditetapkan. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan di masa yang akan datang.

Beberapa proses pengawasan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menentukan standar atau dasar kontrol agar pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama.
2. Ukuran yang telah ditetapkan harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

3. Melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar penyimpangan dan kesalahan dalam melakukan kegiatan dapat dicegah serta diperbaiki.

(Salam, 2004:21).

Dengan adanya pengawasan diharapkan agar pemanfaatan semua unsur manajemen efektif dan efisien. Efektivitas artinya berhasil guna. sedangkan efisien artinya berdaya guna. Menurut, H. Emerson memberikan definisi sebagai berikut :

1. *Effectiveness is measuring in term of attaining precibed goal or objektives.*

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. *The ratio of input to output, benefit to cost performance to the use of resources, as that which maximizes result which limited resources, in orther words, it was the relation between what is accomplished and what migh be accomplished.*

efisien adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan hasil (*output*), antar keuntungan dengan biaya antara hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang dipergunakan, seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan.

(Merson, 1995:223).

Efektifitas suatu pengukuran untuk tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan efisiensi perbandingan yang terbaik antar *input* dan *output*, dengan kata lain hubungan apa yang harus telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan.

### 3. Teori Peran

#### a. Pengertian Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soekanto, 2001:267).

Teori yang mendukung penelitian ini adalah *role theory* (teori peran) yang dikemukakan oleh Khantz dan Kahn yang dikutip dalam buku Sosiologi sebagai pengantar. Teori Peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kejadian masyarakat. Teori Peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan.

Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995: 571) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadar minta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu perbuatan/ kegiatan seseorang atas sesuatu pekerjaan dari suatu kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peran. Jika dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan.

### b. Dimensi Peran

Mengenai peranan ini, Horoeopetri, Arimbi dan Santosa (2003), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang *responsif* dan *responsibel*.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini dalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biases*).

- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2009 : 212), “Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan”. Dalam pendapatnya Soerjono Soekanto (2009 : 212) menjelaskan :

...”Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya”.

#### **4. Teori Pemberdayaan**

##### **a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Teori dalam praktek pemberdayaan masyarakat menggambarkan distribusi kekuasaan dan sumberdaya dalam masyarakat, bagaimana fungsi fungsi organisasi dan bagaimana sistem dalam masyarakat mempertahankan diri. Teori pemberdayaan masyarakat memberikan petunjuk apa yang sebaiknya dilakukan di dalam situasi tertentu. Berkaitan dengan judul penelitian ini, teori yang penulis gunakan ialah teori konstruktivisme (Rusmanto, 2013:34).

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Menurut Ketaren (2008: 178-183) pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan sebuah "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: Tahap pertama Penayadaran, pada tahap penayadaran ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penayadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai "sesuatu", prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun "*demand*") diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Setelah menayadari, tahap kedua adalah Pengkapasitasan, atau memampukan (*enabling*) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah Pemberian Daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka.

Sardlow (Adi, 2003:54) melihat berbagai pengetian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Kata pemberdayaan mengesahkan arti adanya sikap mental yang tangguh. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu: Pertama, kecenderungan

primer. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kedua, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi agar individu mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

#### **b. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah menumbuh kembangkan potensi masyarakat, meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan gotong-royong, bekerja bersama masyarakat, berbasis masyarakat, kemitraan organisasi masyarakat lain serta desentralisasi. Keberadaan prinsip pemberdayaan masyarakat dapat menumbuhkan peran aktif masyarakat, sehingga serangkaian kegiatan pemberdayaan berjalan dengan baik.

Rubin dalam Sumaryadi (2005: 94-96) mengemukakan 5 prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan masyarakat memerlukan break-even dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.
- 2) Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.

- 3) Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik.
- 4) Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya.
- 5) Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan. (Delivery dalam Sutrisno, 2005:17).

#### **c. Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan, dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan. Menurut Mardikanto (2012:161) bahwa "Pendekatan yang dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat terbagi atas:

#### 1) Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif berorientasi pada pendekatan dalam memberdayakan masyarakat secara aktif dalam berpartisipasi secara sadar dalam mengembangkan mengupayakan diri secara sadar sehingga dapat memenuhi kebutuhannya melalui pengetahuan dan keterampilan.

#### 2) Pendekatan Kesejahteraan

Pendekatan kesejahteraan merupakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan berbagai upaya yang dilakukan difokuskan dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pendekatan ini masyarakat menjadi indikator utama dalam pemberdayaan.

#### 3) Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan.

Pendekatan ini berorientasi pada program-program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pendekatan pemberdayaan tersebut tergantung pada program yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dilakukan secara berkelanjutan.

#### **d. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan memiliki indikator-indikator untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana pemberdayaan yang dilakukan pemerintah akan tercapai sesuai dengan harapan. Suharto (dalam Hatu, 2010:103) menjelaskan bahwa dimensi-dimensi yang dapat dijadikan indikator pemberdayaan masyarakat

dalam suatu negara disesuaikan dengan program pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat yaitu:

1) Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan

Pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan kebutuhan. Kebutuhan ekonomi berkenaan dengan mutu pekerjaan masyarakat sedangkan di bidang pendidikan berkenaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

2) Peningkatan Pendapatan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pula dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Misalnya petani dapat meningkat hasil panennya sehingga menambah penghasilannya setiap bulan.

3) Partisipasi dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat tampak pula pada partisipasi dalam pembangunan di desa, seperti pembangunan infrastruktur dalam bentuk partisipasi ide pikiran, partisipasi bantuan dana maupun bantuan tenaga dalam pembangunan yang ada di desa.

Sedangkan lima yang lainnya berkaitan dengan basis keberdayaan

(Friedman, 1992), yakni:

- 1) Pengembangan berbasis masyarakat.
- 2) Keberlanjutan
- 3) Partisipasi masyarakat
- 4) Pengembangan modal sosial masyarakat.
- 5) Penghapusan ketimpangan gender

## 5. Konsep Pemerintah Kelurahan

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri Soemantri, 1976: 17) sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 1986: 28). Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik (Muhammad Yamin, 1982: 112).

Samuel Edward Finer (Syafi;ie 2004:5) dalam bukunya yang terkenal *Comparative Government*, mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*process*), harus mempunyai Negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), mempunyai pejabat pemerintah (*the duty*) dan mempunyai cara, metode, serta sistem (*manner, method, and system*) terhadap rakyatnya.

Menurut Suhady dalam W. Riawan Tjandra (2009: 197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

Konsep pemerintah didefinisikan oleh Istianto (2009:25) adalah: merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafrudin di kutip Istianto (2009:25) bahwa: Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar.

Selanjutnya pengertian Kelurahan menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 pada pasal 229 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## 6. Tinjauan Umum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, berkesetaraan dan berkeadilan gender serta berkesadaran hukum dan lingkungan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 1 bahwa gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan wadah membina keluarga bermasyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan yang dapat menghasilkan sinergi untuk keluarga sejahtera yang mandiri dengan meningkatkan mental spiritual perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila. Dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan berbagai upaya atau usaha dan kegiatan, seperti meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, ikut mengupayakan dalam kehidupan bangsa serta meningkatkan

pendapatan keluarga, meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung. Dalam melakukan kegiatan tersebut perlu adanya pengelolaan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-program, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat (Sutedjo, 2006: 3).

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1: Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Ramandita Shalfiah (2013)	Peranan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam mendukung program-program pemerintah Kota Bontang	Fungsi peran PKK adalah sebagai fasilitator dan penyuluh dalam mendukung program-program pemerintah Kota Bontang sudah berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa masukan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan PKK untuk mendukung program pemerintah Kota Bontang, tetapi karena berjalannya kegiatan penyuluhan dalam memotivasi dan menggerakkan masyarakat dalam hal pendidikan, ekonomi dan kesehatan dapat membantu meminimalisir masalah tersebut.
2	Aryati Wulandari (2018)	Peranan pemberdayaan PKK dalam pemberdayaan keterampilan masyarakat Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan	Hasil penelitian ini menjelaskan peran aktif dari PKK kelurahan Rengas Pulau mampu mendukung berkembangnya kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat sekaligus menambah wawasan dan pendapatan masyarakat serta sebagai perpanjangan tangan pemerintah terhadap program-

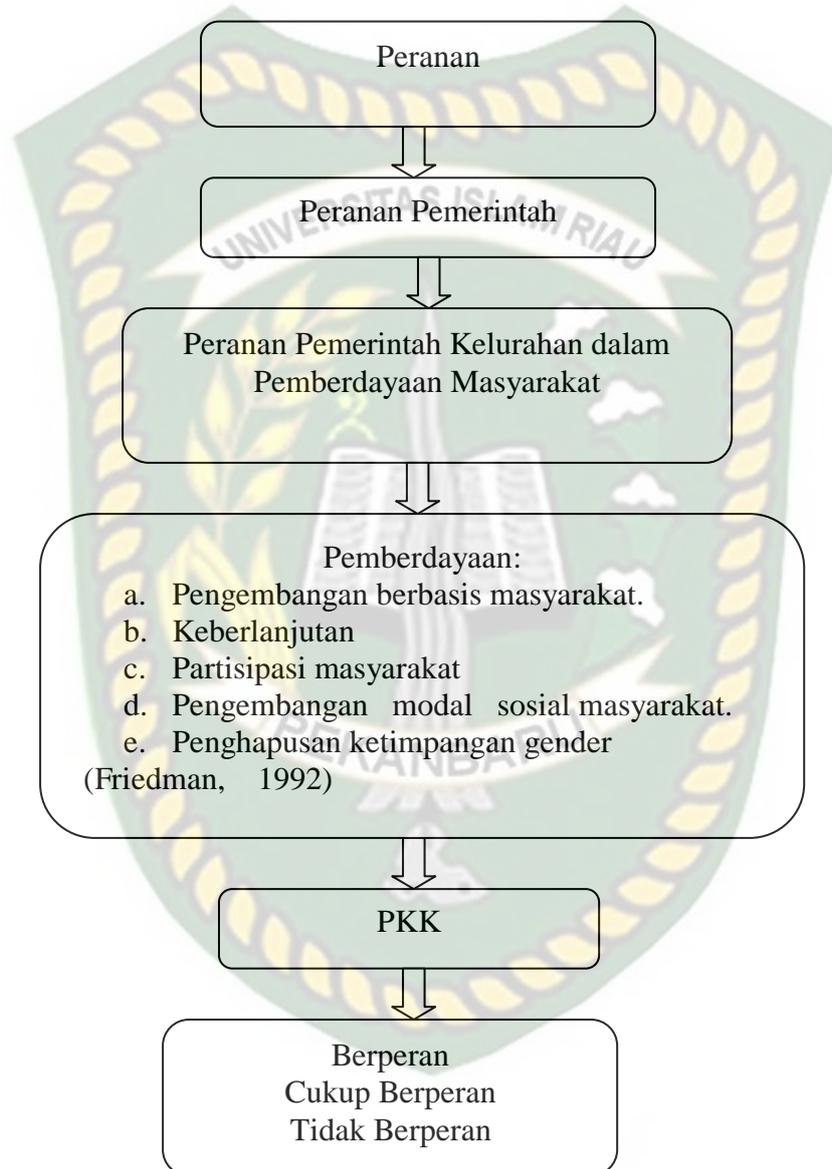
			program yang ada khususnya pengembangan keterampilan masyarakat. Dengan seringnya diadakan penyuluhan/pelatihan keterampilan serta pembinaan dari kelurahan Rengas Pulau akan terbentuk kader-kader dan masyarakat yang terampil dan berpotensi.
3	Komang Ayu Kusuma Wardani (2015)	Peranan kepemimpinan Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar)	Hasil dari penelitian ini, ialah pemberdayaan masyarakat yang terlaksana di Kelurahan Samplangan ialah pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan seperti LPM, PKK, dan Karang Taruna. Di dalam pemberdayaan ini, lurah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berkemauan dan berkemampuan untuk berpartisipasi di setiap kegiatan pemerintah.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu, penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah bahwa teletak pada objek penelitian yaitu penataan dan pengelolaan pasar, yang menjadi perbedaannya adalah terletak pada tempat penelitian dan fokus penelitian.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu terkait. Sesuai dengan konsep dan teori-teori yang telah dikemukakan, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui gambar bagan sebagai berikut:

**Gambar II.I : Kerangka Pikir Tentang Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**



*Sumber : Friedman (1992)*

#### D. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita.

Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut.

1. Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta cara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Lurah adalah tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan, hal ini akan meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kenyataan setempat dan mempertajam keberlanjutan program karena masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap apa yang ia kerjakan.

5. Indikator Dari Variabel pemberdayaan masyarakat adalah:

a. Pengembangan berbasis masyarakat

Model pembangunan alternatif menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*), berparadigma bottom up dan lokalitas. Munculnya model pembangunan alternatif didasari oleh sebuah motivasi untuk mengembangkan dan mendorong struktur masyarakat agar lebih berdaya dan menentang struktur penindasan melalui pembuatan regulasi yang berpijak pada prinsip keadilan. Pendekatan yang dipakai dalam model pembangunan alternatif adalah pembangunan tingkat lokal, menyatu dengan budaya lokal, bukan memaksakan suatu model pembangunan dari luar serta sangat menyertakan partisipasi orang-orang lokal.

b. Keberlanjutan

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam perspektif pembangunan alternatif sangat memerhatikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Prinsip keberlanjutan ini telah menjadi bagian integral dalam pembangunan ekonomi masyarakat dunia, yang dikenal dengan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Pembangunan berkelanjutan sebagai praktik pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa menurunkan atau merusak kemampuan generasi mendatang untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberlanjutan dalam konteks ini sangat menekankan keterpaduan atau integrasi antara tiga sistem pokok: lingkungan (*enviromental*, ekonomi, sosial) serta memusatkan perhatian pada masalah-masalah kualitas kehidupan.

c. Partisipasi masyarakat

Pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui penekanan partisipasi secara efektif dalam melibatkan masyarakat. Hal ini terlihat dalam proses keterlibatan dalam mengidentifikasi masalah hingga perencanaan, dari pengorganisasian dan pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi.

d. Pengembangan modal sosial masyarakat.

Menurut sejumlah literatur, keberadaan aksi-aksi pembangunan alternatif antara lain melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk menyempurnakan keterbatasan dan kekurangan dari model pembangunan pro pertumbuhan cenderung bercorak simplistik. Salah satu indikasinya adalah penekanannya pada upaya-upaya akumulasi modal fisik (*physical capital*) secara sentralistik dan cenderung mengabaikan aspek keterkaitannya dengan kapital-kapital yang lain seperti modal alami (*natural capital*), modal manusia (*human capital*), dan modal sosial (*social capital*). Ketidaksinambungan antarkapital telah melahirkan multikritis dalam pembangunan selamai ini.

e. Penghapusan ketimpangan gender

Perbedaan posisi ekonomi menunjuk kepada peranan apa yang diletakkan pada orang, baik pria maupun wanita, dalam proses atau pekerjaan mencari nafkah dan pekerjaan rumah tangga (misalnya dengan norma: menurut kekuatan atau kecakapan bekerja masing-masing khususnya dalam pekerjaan mencari nafkah), yang umumnya erat terjalin dengan lain-lain fungsi

**E. Operasional Variabel**

**Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skla pengukuran
1	2	3	4	5
Pemberdayaan Masyarakat adalah proses partisipatif yang member kepercayaan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan	Peranan Lurah dalam Memberdayakan PKK	Pengembangan berbasis masyarakat	a. Memberikan pelatihan ekonomi keluarga b. Melakukan peraktek ekonomi keluarga c. Mendampingi dalam memproduksi	Baik Cukup Baik Tidak Baik
		Keberlanjutan	a. Pelatihan usaha ekonomi kebijakan pada bidang tertentu b. Pendidikan dan pelatihan dengan kajiannya c. Pembimbingnya di awasi oleh pemerintah	Baik Cukup Baik Tidak Baik
		Partisipasi masyarakat	a. Masyarakat mendukung kelompok PKK b. Masyarakat membeli produksi PKK c. Masyarakat	Baik Cukup Baik Tidak Baik

			memasarkan produksi PKK	
		Pengembangan modal sosial masyarakat	a. Saling percaya b. Kerja sama c. Kejujuran	Baik Cukup Baik Tidak Baik
		Penghapusan ketimpangan gender	a. Memberi ketimpangan pada penghapusan b. Tidak ada perbedaan gender c. Pemberian tempat yang sama pada perempuan	Baik Cukup Baik Tidak Baik

Sumber : Friedman (1992)

#### F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator.

Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Pengembangan berbasis masyarakat

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengembangan berbasis masyarakat Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir Mencapai (67% 100% )

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengembangan berbasis masyarakat Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir Mencapai ( 34%-66% )

Tidak Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengembangan berbasis masyarakat Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Mencapai (1%-33%)

#### **b. Keberlanjutan**

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Keberlanjutan Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100% )

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Keberlanjutan Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66% )

Tidak Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Keberlanjutan Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (1%-33% )

#### **c. Partisipasi masyarakat**

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Partisipasi masyarakat Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100% )

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Partisipasi masyarakat Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66% )

Tidak Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Partisipasi masyarakat Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (1%-33% )

**d. Pengembangan modal sosial masyarakat**

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengembangan modal sosial masyarakat Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100% )

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengembangan modal sosial masyarakat Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66% )

Tidak Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengembangan modal sosial masyarakat Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (1%-33% )

**e. Penghapusan ketimpangan gender**

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Penghapusan ketimpangan gender Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100% )

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Penghapusan ketimpangan gender Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66% )

Tidak Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Penghapusan ketimpangan gender Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (1%-33% )

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan serangkaian pengamatan yang dilakukan selama jangka waktu tertentu terhadap suatu fenomena yang memerlukan jawaban dan penjelasan. Metode penelitian mempunyai peranan yang penting dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian serta dalam melakukan analisis masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan tipe survey penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian deskriptif adalah uraian sistematis tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang di teliti. (Sugiono, 2016;63). Kemudian metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menurut Sugiyono (2012 : 16) proses penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat linear, dimana langkah-langkahnya

jelas, mulai dari rumusan masalah, berteori, berhipotesis, mengumpulkan data, analisis data dan membuat kesimpulan dan saran.

Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada penggunaan angka-angka yang membuatnya lebih mendetail dan jelas, selain itu penggunaan tabel, grafik dan juga diagram.

### **B. Lokasi Penelitian**

1. Lokasi penelitian adalah di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir

Alasan penulis memilih lokasi penelitian berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan organisasi PKK belum berdampak maksimal terhadap Kelurahan.

### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2012;90). Sampel adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (Silalahi,2012;254).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan

waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91).

Berdasarkan teori populasi dan sampel diatas maka penulis menepatkan exsampil sebagai mana dalam penelitian ini meliputi fungsi manajemen dan fungsi kepemimpinan.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu meliputi: Kepala Kelurahan Pekan Arba, Sekretaris Desa Kelurahan Pekan Arba, staff Kelurahan Pekan arba,Ketua PKK dan kader PKK Kelurahan Pekan Arbak.

**Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Kelurahan Pekan Arba	1	1	100%
2	Sekretaris Kelurahan Pekan Arba	1	1	100%
3.	Staff Kelurahan Pekan Arba	3	3	100%
3	Ketua PKK Kelurahan Pekan Arbak	1	1	100%
4	Kader PKK Kelurahan Pekan Arba	15	15	100%
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Penulis tahun 2020*

Penelitian Peranan Lurah dalam Memberdayakan PKK di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki populasi yang mana adalah Kepala Kelurahan Pekan Arbak sebanyak 1 Orang, dengan

persentase 100%, Sekretaris Kelurahan Pekan Arbak sebanyak 1 Orang dengan persentase 100%, staff Kelurahan Prkan Arba 3 Orang dengan persentase 100%, Ketua PKK Kelurahan Pekan Arbak sebanyak 1 orang dengan persentase 100% dan yang terakhir adalah Kader PKK Kelurahan Pekan Arbak memiliki populasi sebanyak 15 dengan sampel 15 Orang dengan persentase 100%. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki populasi (Sugiyono,2007;73). Jadi sampel yang di tentukan oleh penulis merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakter.

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkim mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91).

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah Untuk Kepala Kelurahan Pekan Arbak, Sekretaris Kelurahan Pekan Arbak, Ketua PKK dan Anggota PKK Kelurahan Pekan Arbak digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lain adalah sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

#### **E. Jenis Dan Sumber Data**

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti:

- a. Identitas responden
- b. Tanggapan responden tentang Peranan Lurah dalam Memberdayakan PKK di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

## 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor Kelurahan Pekan Arbak. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :

- a. Sejarah singkat Kelurahan Pekan Arbak.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian
- c. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Pekan Arbak.
- d. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut

- a. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. Kalau wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari tulisan, buku, dll.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa.

Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

### **H. Jadwal Kegiatan Penelitian**

Jadwal kegiatan penelitian adalah pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci.

**Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	JenisKegiatan	Tahun 2020															
		Jan – Maret				April – September				oktober- November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	PersiapanPenyusunan	■	■	■	■												
2	Seminar UP		■														
3	Perbaikan UP			■	■												
4	Revisikuesiner					■	■										
5	Rekomendasi survey							■	■								
6	Survey lapangan									■	■	■	■				
7	Analisis data													■			
8	Penyusunanlaporanhasil penelitian														■		
9	Konsultasirevisiskripsi															■	
10	Ujiankomprehensifskripsi															■	■
11	Revisiskripsi																■
12	Penggandaanskripsi																■

Sumber Modifikasi penulis, 2020

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Profil Kabupaten Indragiri Hilir

##### 4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan ibu kotanya adalah Tembilahan dengan luas wilayah 18.812,97 km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 km<sup>2</sup>, luas perairan laut 6.318 km dan luas perairan umum 888,97 km serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kabupaten Pelalawan
- Selatan : Kabupaten Tanjung Jabu Provinsi Jambi
- Barat : Kabupaten Indragiri Hulu
- Timur : Provinsi Kepulauan Riau

Sebagian dari luas wilayah atau 93,31 % daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (*peat*), daerah hutan payau (*mangrove*), dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas leih kurang 1.082.953,06 Ha dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35

meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi untuk mengembangkan daerah pada sector ekonomi. Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir maka salah satu factor pendukungnya adalah dengan memperbaiki system pelayanan publik sehingga dapat mengundang investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi alam yang baik berupa pertanian, pertambangan, perikanan, maupun potensi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri dan berbagai potensi lainnya. Dalam perdagangan dan jasa masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir berorientasi ke daerah-daerah seperti Jambi, Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Malaysia dan Singapore. Untuk kawasan Industri, dapat menciptakan peluang bisnis dan investasi pada bidang perdagangan dan jasa berupa kegiatan ekspor perdagangan kapal barang dan ferry, pengembangan jasa peti kemas dan pengolahan kawasan industry. Pelayanan publik yang baik akan mendorong pemberdayaan potensi yang ada pada Kabupaten Indragiri Hilir. Karena dalam setiap usaha memiliki izin yang sah dari pemerintah sehingga fungsi kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu faktor pendukung dalam kemajuan

Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat hendaknya menggali seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir.

## **4.2 Deskripsi Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

### **4.2.1 Sejarah Kecamatan Tembilahan**

Seiring dengan pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir yang diawali pada dekade kemerdekaan Indonesia, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih menjadi satu kesatuan Kabupaten Indragiri terdiri atas 3 kewedanan, yaitu Kewedanan Kuantan Singingi ibu kotanya Teluk Kuantan, Kewedanan Indragiri Hulu ibu kotanya Rengat dan kewedanan Indragiri Hilir ibu kotanya Tembilahan. Berawal dari keinginan untuk memisahkan diri maka melalui kesepakatan bersama, masyarakat Indragiri Hilir meminta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II berdiri sendiri (Otonom). Setelah melalui penelitian, oleh Gubernur dan Departemen Dalam Negeri, pemekaran disetujui dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Propinsi Riau) tertanggal 27 april 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 1965 berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49, Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi sebuah daerah Kabupaten tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) sebagai salah satu Kabupaten di Riau terhitung tanggal 20 November 1965. Perkembangan tata

pemerintahan selanjutnya, menjadikan Indragiri Hilir dipecah menjadi 2 kewedanan masing-masing:

Kewedanan Indragiri Hilir Utara dengan ibu kotanya Tembilahan meliputi

Kecamatan :

1. Kecamatan Tempuling
2. **Kecamatan Tembilahan**
3. Kecamatan Gaung Anak Serka
4. Kecamatan Mandah
5. Kecamatan Kateman
6. Kecamatan Kuala Indragiri

Kewedanan Indragiri Hilir Selatan dengan ibu kotanya Enok meliputi

Kecamatan:

1. Kecamatan Enok
2. Kecamatan Reteh

#### **4.2.2 Profil Kecamatan Tembilahan**

##### **a. Geografis Kecamatan Tembilahan**

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197,37 Km<sup>2</sup> atau 19,737 Ha. Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka

**b. Keadaan Alamnya**

Tinggi pusat Pemerintah wilayah Kecamatan Tembilahan dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Dipinggir sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumuhtumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa.

**c. Iklim dan curah Hujan**

Keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab. Sejalan dengan pesatnya perkembangan kota Tembilahan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan penduduk, lingkungan hidup, perekonomian terutama tingkat pelayanan kemasyarakatan maka akan terjadi perubahan keseimbangan antara kuantitas/kualitas yang signifikan didalam suatu wilayah daerah pemerintahan.

**d. Penduduk**

Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku Melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku Melayu di daerah Indragiri Hilir juga memiliki system kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan dating dan

menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke Indragiri Hilir yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang.

**Tabel 4.1 Jumlah Rumah Tangga (RT) dan Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tembilahan Tahun 2019**

No	Desa/Kelurahan	Rumah Tangga	Rukun Warga	Penduduk
1	2	3	4	5
1	Tembilahan Kota	82	17	5,940
2	Tembilahan Hilir	51	10	2,757
3	Seberang Tembilahan	20	5	1,069
4	Sungai Perak	20	7	1,720
5	Sungai Beringin	29	6	2,280
6	Pekan Arba	23	4	1,781
7.	Seb. Tembilahan Barat	12	3	464
8.	Seb. Tembilahan Selatan	10	3	330
<b>Jumlah</b>		<b>247</b>	<b>55</b>	<b>16,341</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir,2020*

**Tabel 4.2 Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Tembilahan Tahun 2019**

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	L + P
1	2	3	4	5
1	Tembilahan Kota	10,854	10,718	21,572
2	Tembilahan Hilir	7,948	7,937	15,885
3	Seberang Tembilahan	2,215	2,456	4,671
4	Sungai Perak	2,063	2,054	4,117
5	Sungai Beringin	5,748	4,445	10,193
6	Pekan Arba	5,981	5,316	11,297
7.	Seb. Tembilahan Barat	968	899	1,867
8.	Seb. Tembilahan Selatan	691	672	1,363
<b>Jumlah</b>		<b>36,468</b>	<b>34,497</b>	<b>70,965</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir,2020*

**e. Motto Kecamatan Tembilahan**

Kecamatan Tembilahan adalah Kota Ibadah yang merupakan frase atau kalimat yang dipergunakan sebagai semboyan atau simbol yang bermakna pesan moral bahwa Tembilahan adalah Kota “Indah, Bersih, Asri, Damai, Aman dan Harmonis”. Dimana makna Ibadah mempunyai pesan moral bahwa nilai atau nuansa religius melekat pada masyarakat Kota Tembilahan yang Heterogenitas, memiliki keragaman budaya/suku dan agama dalam satu kesatuan hidup yang diwujudkan sehingga menjadi masyarakat kota yang harmonis.

**f. Visi dan Misi Kecamatan Tembilahan**

1. Visi :

*Terwujudnya Tembilahan sebagai Kota “Ibadah” dengan berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang didukung oleh infra struktur dan sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas.*

2. Misi :

- a. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat;
- b. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat paripurna;
- c. Mewujudkan sarana pembangunan infra struktur dalam mendukung pembangunan dibidang kebersihan, keamanan, dan ketertiban serta cakupan Iptek yang bernuansa IMTAQ;
- d. Mewujudkan pembangunan budaya tertib, budaya bersih, dan budaya gotong Royong;

- e. Menumbuh kembangkan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerah;
- f. Fungsi kawasan yang saling mendukung;
- g. Membangkitakan citra kota tepi sungai;
- h. Fungsi pelayanan kota dengan kelengkapan sarana dan fasilitasnya.

#### 4.3 Kelurahan Pekan Arba

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 Pasal 12, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
4. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
7. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
8. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
9. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
10. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 Pasal 5 dalam melaksanakan tugas pokok lurah mempunyai tugas yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Kelurahan Pekan Arbak memiliki organisasi kemasyarakatan kelurahan yaitu PKK. PKK Kelurahan Pekan Arbak mempunyai program pemberdayaan masyarakat salah satu programnya ialah dalam bentuk pemberdayaan keterampilan yang terdapat dalam Program Pokok PKK. Tujuan yang diharapkan dengan adanya program pemberdayaan keterampilan ini adalah peningkatan kesejahteraan keluarga dari segi ekonomi, pendidikan, serta kehidupan sosial pada masyarakat Kelurahan Pekan Arbak. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan keterampilan, masyarakat kelurahan Pekan Arbak dilatih untuk dapat terampil, berpotensi dan mampu mengembangkan sumber daya yang ada.

Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan Pasal 18 menjelaskan bahwa tugas PKK adalah:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
2. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;

3. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
4. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
5. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
6. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
7. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
8. Melaksanakan tertib administrasi; dan
9. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 18 Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
2. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

#### **4.4 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan pembagian tugas kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktifitas yang macam hubungannya sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktifitas kerja. Struktur organisasi juga

menunjukkan herarki dan struktur organisasi serta memperlihatkan hubungan pelaporannya.

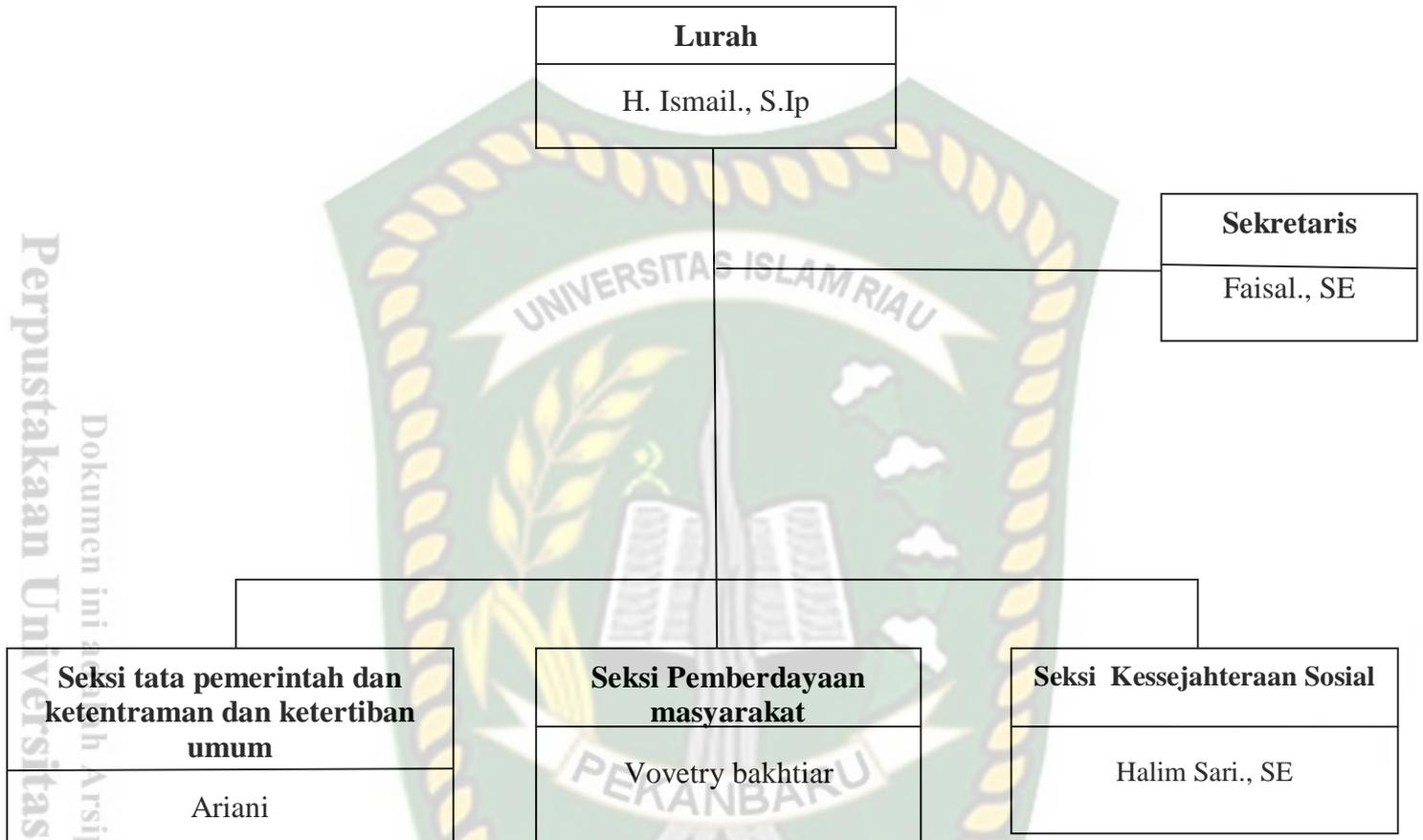
Struktur organisasi memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi mempertahankan kedatangan dan kepentingan individu serta untuk mengoordinasikan hubungan dengan lingkungannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**Gambar 4.1 Struktur organisasi pemerintah kelurahan Pekan Arba  
Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**



*Sumber : Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan data yang diperoleh dari Kelurahan Pecan Arbak Kecamatan Tembilahan yang terlibat didalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dari terpilih menjadi sampel untuk memberikan penjelasan mengenai Parana Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir . Data tersebut diperoleh dari kuisisioner yang telah disebarakan kepada kelurahan dan PKK Kelurahan Pekan Arbak sebanyak 18 orang.

Hasil kuisisioner diperoleh dari sejumlah data yang diperlukan, meliputi data identitas responden dan tanggapan responden tentang Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

#### A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Responden penelitian ini adalah kepala kelurahan, sekretaris, ketua PKK dan anggota PKK kelurahan pecan arbak. Identitas responden berguna untuk

menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

### 1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin pada lokasi penelitian ini terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk melihat jenis kelamin responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.1 Jenis Kelamin Responden Penelitian Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	2	10%
2.	Perempuan	19	90%
<b>Jumlah</b>		21	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian 2020*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden perempuan lebih dominan dari pada laki-laki, dengan jumlah responden perempuan sebanyak 19 orang atau 90% sedangkan responden laki-laki berjumlah 2 orang atau 10%.

### 2. Unsur Responden

Usia merupakan isyarat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dengan baik. Usia muda akan mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal dibandingkan yang usia lebih tua, terkadang terkendala dengan umur yang sudah tergolong usia muda yaitu kurang dari 45 tahun dianggap mampu menjalankan tugasnya dengan baik serta mampu memberikan pengaruhnya dalam bentuk peranannya, sedangkan responden yang masih tergolong usia tua yaitu 45 tahun

akan mendapat kesulitan untuk melaksanakan tugasnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.2 Umur Responden Berdasarkan Usia Termuda dan Usia Tertua**

No	Usia	Responden	Persentase
1.	20-30	3	14%
2.	<b>31-40</b>	<b>9</b>	<b>43%</b>
3.	41-50	4	19%
4.	50 Keatas	5	24%
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat umur responden dalam penelitian ini paling banyak adalah 31-40 sebanyak 9 orang atau 43% dan 50 keatas sebanyak 5 oarang atau 24% sedangkan umur 41-50 sebanyak 4 orang atau 19% dan yang paling sedikit adalah umur 20-30 sebanyak 3 orang atau 14%.

### **3. Tingkat Pendidikan Responden**

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jawaban yang akan diberikan oleh responden, semakin tinggi tingkat pendidikan responden maka semakin baik pula jawaban yang diberikan terhadap rangkaian pertanyaan yang diberikan oleh penelitian dalam kuisisioner penelitian. Dari hasil penelitian tentang Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir serta penyebaran kuisisioner maka identitas rrsponden penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat pendidikan yang tertera pada tabel berikut ini:

**Tabel V.3 Tingkat Pendidikan Responden Penelitian Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	-	-
2.	SMP	3	14%
3.	SMA	15	71%
4.	D3	-	-
5.	S1	3	14%
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden paling banyak tamatan SMA yaitu sebanyak 15 orang dengan persentase 71%, sedangkan tingkat pendidikan responden paling sedikit yaitu S1 dan SMP sebanyak 3 orang dengan persentase 14% , sedangkan untuk tamatan SD dan D3 Tidak ada.

**B. Hasil Penelitian Tentang Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

PKK ( Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) adalah suatu gerakan yang dilkauan oleh ibu-ibu membangun lingkungan dan masyrakat yang sejahtera. Dengan adanya gerakan PKK ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembanagkan sumberdaya manusia yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk membangun bangsa dan Negara dengan Keluarga yang sejahtera.

Gerakan PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang mekanisnya dikelola dan dilaksanakan secure berjenjang dari tingkat terbawah (Desa Wisma, Rukun Tetangga, Rukun Warga ) kelurahan, hingga pusat.

Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terlihat dari lima (5) indikator yaitu Pengembangan berbasis masyarakat, keberlanjutan, partisipasi masyarakat, pengembangan modal social masyarakat dan penghapusan ketimpangan gender. Untuk lebih jelasnya penelitian akan memaparkan setiap indikator sebagai berikut :

### **1. Indikator Pengembangan berbasis masyarakat**

Pengembangan berbasis masyarakat adalah Model pembangunan alternatif menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*), berparadigma bottom up dan lokalitas. Munculnya model pembangunan alternatif didasari oleh sebuah motivasi untuk mengembangkan dan mendorong struktur masyarakat agar lebih berdaya dan menentang struktur penindasan melalui pembuatan regulasi yang berpijak pada prinsip keadilan. Pendekatan yang dipakai dalam model pembangunan alternatif adalah pembangunan tingkat lokal, menyatu dengan budaya lokal, bukan memaksakan suatu model pembangunan dari luar serta sangat menyertakan partisipasi orang-orang lokal. Setelah dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden kemudian dilakukan pengumpulan serta pengolahan data maka didapatkan jawaban responden penelitian mengenai indikator Pengembangan berbasis masyarakat, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.4 Penilaian Responden Unsur Kelurahan Tentang Indikator Pengembangan berbasis masyarakat Pada Penelitian Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Memberikan pelatihan ekonomi keluarga	1	4	0	5
2.	Melakukan peraktek ekonomi keluarga	3	2	0	5
3.	Mendampingi dalam memproduksi	0	5	0	5
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Persentase</b>		<b>20%</b>	<b>80%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Penelitian 2020*

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 5 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 1 orang, cukup baik sebanyak 4 orang dan yang menjawab kurang baik 0 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 3 orang, cukup baik sebanyak 2 orang dan jawaban kurang baik 0 orang . selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yang menjawab baik sebanyak 0 orang, yang menjawab cukup baik sebanyak 5 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 0 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Pengembangan berbasis masyarakat sebanyak 4 orang dengan rata-rata 1 dengan persentase 20%. Sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator Pengembangan berbasis masyarakat sebanyak 11 dengan rata-rata 4 dengan persentase 80% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap

indikator Pengembangan berbasis masyarakat sebanyak 0 dengan rata-rata 0 dengan persentase 0%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada Unsur Lurah indikator Pengembangan berbasis masyarakat bahwa responden menilai Pengembangan berbasis masyarakat Pada Penelitian Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Pekan Arba pada Tanggal 28 September 2020, penelitian mengajukan pertanyaan : Apa saja bentuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang ada dikelurahan Pekan Arbak ?

Ia mengatakan bahwa :

*“Terkait bentuk-bentuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang dilakukan dikelurahan Pekan Arba ini cukup banyak sekali yang mana diantaranya adalah kegiatan arisan bulanan PKK kantor lurah Pekan Arbak, ada juga praktek membuat rajut dari benang wol, kemudian kegiatan di posyandu dan praktek membuat kerajinan tempat air minum dari ale-ale, ada bnayak kegiatan lagi yang dimiliki PKK Kelurahan pecan arba”*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan. Apakah Kelurahan Pekan Arba memberikan pelatihan ekonomi keluarga ?

Ia mengatakan bahwa :

*“Dalam hal pelatihan ekonomi kelurga kami telah memberikannya yang mana adanya peraktel pembuatan kerajinan dari bahan gelas air minum yang*

mana nantinya ini bisa dikelola untuk menghasilkan uang namun pada saat ini PKK lebih aktif pada kegiatan posyandu”.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya program PKK.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari wawancara, Kuisisioner dan obsevasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ( studi tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dinilai Cukup Baik dengan persentase 80% dari jumlah responden yang berjumlah 5 orang.

**Tabel V.5 Penilaian Responden Unsur PKK Tentang Indikator Pengembangan berbasis masyarakat Pada Penelitian Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Memberikan pelatihan ekonomi keluarga	6	7	3	16
2.	Melakukan peraktek ekonomi keluarga	8	7	1	16
3.	Mendampingi dalam memproduksi	5	9	2	16
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>48</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>16</b>
<b>Persentase</b>		<b>38%</b>	<b>50%</b>	<b>13%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Penelitian 2020*

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 16 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 6

orang, cukup baik sebanyak 7 orang dan yang menjawab kurang baik 3 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 8 orang, cukup baik sebanyak 7 orang dan jawaban kurang baik 1 orang . selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yang menjawab baik sebanyak 5 orang, yang menjawab cukup baik sebanyak 9 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 2 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Pengembangan berbasis masyarakat sebanyak 19 dengan rata-rata 6 dengan persentase 38%. Sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator Pengembangan berbasis masyarakat sebanyak 23 dengan rata-rata 8 dengan persentase 50% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator Pengembangan berbasis masyarakat sebanyak 6 dengan rata-rata 2 dengan persentase 13%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada Unsur PKK indikator Pengembangan berbasis masyarakat bahwa responden menilai Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PKK pada Tanggal 29 September 2020, penelitian mengajukan pertanyaan :

Apakah Kelurahan juga ikut membantu PKK dalam mendampingi pemerintah ?

Ia mengatakan bahwa :

*“kelurahan sangat membantu PKK dalam mendampingi pemerih dalam kegiatan kami untuk mengembangkan kegiatan PKK di Kelurahan Pekan Arba”*

Sebagai mana yang dikatakan oleh salah satu anggota PKK yang bernama Elyani di kediamannya :

Bagaimana menurut ibu menenai kegiatan PKK di Kelurahan pekan arba ?

Ia mengatakan bahwa :

*“saat ini kegiatan PKK di Kelurahan pekan arbak sudah cukup baik karna ada yang menjadi kendala kami bersama yang mana kami masih tidak memahami dan tidak mengerti apa manfaat dan kegunaan dari kegiatan tersebut”*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya program PKK kegiatan Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk lebih jelasnya apa saja yang di observasi di lapangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.6 Hasil Observasi Tentang Kegiatan PKK di Kelurahan Pekan Arba**

No	Uraian	Keterangan
1	Nama kegiatan	Pengembangan berbasis masyarakat
2	Waktu Kegiatan	Selasa, 29 September 2002
3	Tempat Kegiatan	Kediaman salah satu anggota PKK
4	Alur yang terlibat	16 kader PKK
5	Hasil Observasi	Perlunya pengarahan terhadap kader PKK agar mereka bisa mengajak masayarakat untuk memahami pentingnya kegiatan PKK dalam ekonomi keluarga

*Sumber : Observasi peneliti 2020*

Berdasarkan hal tersebut diatas dari wawancara, Kuisisioner dan obsevasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dinilai Cukup Baik dengan persentase 50% dari jumlah responden yang berjumlah 16 orang.

## 2. Indikator keberlanjutan

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam perspektif pembangunan alternatif sangat memerhatikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Prinsip keberlanjutan ini telah menjadi bagian integral dalam pembangunan ekonomi masyarakat dunia, yang dikenal dengan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Pembangunan berkelanjutan sebagai praktik pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa menurunkan atau merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberlanjutan dalam konteks ini sangat menekankan keterpaduan atau integrasi antara tiga sistem pokok: lingkungan (*enviromental*, ekonomi, sosial) serta memusatkan perhatian pada masalah-masalah kualitas kehidupan. Setelah dilakukan penyebaran kuisisioner kepada responden kemudian dilakukan pengumpulan serta pengelolaan data maka didapatkan jawaban responden mengenai indikator Keberlanjutan, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.7 Penilaian Responden Unsur Kelurahan Tentang Indikator Keberlanjutan Pada Penelitian Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pelatihan usaha ekonomi kebijakan pada bidang tertentu	1	3	0	5
2.	Pendidikan dan pelatihan dengan kajiannya	2	2	1	5
3.	Pembimbingnya di awasi oleh pemerintah	0	4	1	5
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>15</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>Persentase</b>		<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Data tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 5 responden untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 1 orang, cukup baik sebanyak 3 orang dan yang menjawab kurang baik 0 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 2 orang, cukup baik sebanyak 2 orang dan yang menjawab kurang baik 1 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yang memberikan tanggapan baik 0 orang, cukup baik 4 orang dan kurang baik sebanyak 1 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Keberlanjutan sebanyak 3 dengan rata-rata 1 dengan persentase 20%. Sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator Keberlanjutan sebanyak 9 dengan rata-rata 3 dengan persentase 60%. Sedangkan yang memberi tanggapan kurang baik terhadap indikator Keberlanjutan Sebanyak 2 dengan rata-rata 1 dengan persentase 20%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator Keberlanjutan bahwa responden menilai Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah pekan arba pada tanggal 28 September 2020, peneliti mengajukan pertanyaan, Apakah pendidikan dan pelatihan ada yang terlaksana ?

Ia menjawab :

*“pendidikan dan pelatiba itu ada terlaksana namun ini tidak berjalan dengan optimal yang mana setelah mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan mereka tidak menerapkannya sehingga kegiatan PKK tidak mengalami peningkatan padahal guna diadakannya pendidikan dan pelatihan agar mereka memahami apa tujuan di bentuknya kegiatan PKK tersebut”*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan, apakah pelatihan usaha ekonomi keberlanjutan hanya bidang tertentu ?

Ia menjawab bahwa :

*“saat ini tidak ada pelatihan untuk keberlanjutan usaha ekonomi ini di karnakan ketersediaan dana yang tidak mencukupi”*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih keterbatasan dukungan anggran dikarnakan mengingat keterbatasan anggaran Kelurahan dalam pembinaan PKK kegiatan Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, Kuisisioner dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir dinilai Cukup Baik dengan persentase 60% dari jumlah responden yang berjumlah 5 orang.

**Tabel V.8 Penilaian Responden Unsur PKK Tentang Indikator Keberlanjutan Pada Penelitian Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pelatihan usaha ekonomi kebijakan pada bidang tertentu	5	7	4	16
2.	Pendidikan dan pelatihan dengan kajiannya	6	10	0	16
3.	Pembimbingnya diawasi oleh pemerintah	6	4	6	16
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>48</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>6</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>16</b>
<b>Persentase</b>		<b>38%</b>	<b>44%</b>	<b>19%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Data tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 16 responden untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 5 orang, cukup baik sebanyak 7 orang dan yang menjawab kurang baik 4 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 6 orang, cukup baik sebanyak 10 orang dan yang menjawab kurang baik 0 orang.

Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yang memberikan tanggapan baik 6 orang, cukup baik 4 orang dan kurang baik sebanyak 6 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Keberlanjutan sebanyak 17 dengan rata-rata 6 dengan persentase 38%. Sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator Keberlanjutan sebanyak 21 dengan rata-rata 7 dengan persentase 44%. Sedangkan yang memberi tanggapan kurang baik terhadap indikator Keberlanjutan Sebanyak 10 dengan rata-rata 3 dengan persentase 19%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator Keberlanjutan bahwa responden menilai Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PKK pada tanggal 29 September 2020, peneliti mengajukan pertanyaan, Apakah ada pembinaan khusus pada bidang tertentu ?

Ia menjawab bahwa :

*“terkait pembinaan khusus itu memang ada, pembinaan yang sering dilakukan adalah pembinaan kader terkait posyandu”*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan, Apa yang menjadi kendala dalam pelatihan PKK ?

Ia Menjawab bahwa :

“Yang menjadi kendala terkait pelatihan dan kegiatan yang lainnya adalah terbatasnya anggaran lurah sehingga kegiatan ini belum bias dikatakan berjalan dengan baik”

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih keterbatasan dukungan anggaran dikarenakan mengingat keterbatasan anggaran Kelurahan dalam pembinaan PKK Dalam Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk lebih jelasnya apa saja yang di observasi di lapangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.9 Hasil Observasi Tentang Kegiatan PKK di Kelurahan Pekan Arba**

No	Uraian	Keterangan
1	Nama kegiatan	Keberlanjutan
2	Waktu Kegiatan	Selasa, 29 September 2002
3	Tempat Kegiatan	Kediaman salah satu anggota PKK
4	Alur yang terlibat	16 kader PKK
5	Hasil Observasi	Perlunya bimbingan dari lurah agar kader PKK bisa mengembangkan produksinya untuk dijadikan salah satu sumber penghasilan dana kegiatan PKK

**Sumber : Observasi peneliti 2020**

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, Kuisisioner dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dinilai

Cukup Baik dengan persentase 44% dari jumlah responden yang berjumlah 16 orang.

### 3. Indikator Partisipasi Masyarakat

Pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui penekanan partisipasi secara efektif dalam melibatkan masyarakat. Hal ini terlihat dalam proses keterlibatan dalam mengidentifikasi masalah hingga perencanaan, dari pengorganisasian dan pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi. Setelah dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden kemudian dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data maka didapatkan jawaban responden penelitian mengenai indikator Partisipasi masyarakat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.10 Penilaian Responden Unsur Kelurahan Tentang Indikator Partisipasi Masyarakat Pada Penelitian Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Masyarakat mendukung kelompok PKK	1	3	1	5
2.	Masyarakat membeli produk PKK	0	1	4	5
3.	Masyarakat memasarkan produksi PKK	1	1	3	5
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>Persentase</b>		<b>20%</b>	<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa jawaban keseluruhan 5 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 1 orang, cukup baik sebanyak 3 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 1 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 0, cukup baik 1 orang dan yang menjawab kurang baik 4 orang. Untuk pertanyaan ketiga responden yang memberikan tanggapan baik sebanyak 1 orang, cukup baik 1 orang dan kurang baik sebanyak 3 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator partisipasi masyarakat sebanyak 2 dengan rata-rata 1 dengan persentase 20% sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator partisipasi masyarakat sebanyak 5 dengan rata-rata 2 dengan persentase 40% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator partisipasi masyarakat sebanyak 8 dengan rata-rata 3 persentase 60%.

Berdasarkan hasil analisis kuisisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator partisipasi masyarakat bahwa responden menilai hasilnya **“Kurang Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah pada tanggal 28 September 2020, penelitian mengajukan pertanyaan : Apakah semua masyarakat mendukung adanya kelompok PKK ?

Ia mengatakan bahwa :

*“saat ini atau dari awal terbentuknya PKK ini hamper semua masyarakat sangat mendukung apa lagi ini bias mengisi kekosongan kegiatannya nmaun semangat mereka hanya terjadi di awal saja semakin hari semangat mereka*

*berkurang dengan salah satu alasan dari mereka adalah tidak adanya keuntungan untuk dia jadi ia lebih memilih untuk di rumah”*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan : Bagaimana dengan perkembangan produk PKK ?

Ia mengatakan bahwa :

*“Produk atau hasil karya dari PKK yang bias dilihat saat ini adalah rajut yang dibuat dari benang wol dan keranjang yang dibuat dari gelas minuman (ale-ale) namun ini hanya sampai apada peraktek saja tidak dipasarkan dikalangan masyarakat”*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih banyaknya kader-kader PKK yang masih fasip dan kesadarannya dalam berperan aktif pun masih kurang dalam kegiatan .

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, Kuisisioner dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dinilai Cukup Baik dengan persentase 60% dari jumlah responden yang berjumlah 5 orang

**Tabel V.11 Penilaian Responden Unsur PKK Tentang Indikator Partisipasi Masyarakat Pada Penelitian Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Masyarakat mendukung kelompok PKK	1	8	7	16
2.	Masyarakat membeli produk PKK	6	4	6	16
3.	Masyarakat memasarkan produksi PKK	5	5	6	16
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>48</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
<b>Persentase</b>		<b>25%</b>	<b>38%</b>	<b>38%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Dari tabel diatas terlihat bahwa jawaban keseluruhan 16 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 1 orang, cukup baik sebanyak 8 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 7 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 6 orang, cukup baik 4 orang dan yang menjawab kurang baik 6 orang. Untuk pertanyaan ketiga responden yang memberikan tanggapan baik sebanyak 5 orang, cukup baik 5 orang dan kurang baik sebanyak 6 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator partisipasi masyarakat sebanyak 12 dengan rata-rata 4 dengan persentase 25% sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator partisipasi masyarakat sebanyak 17 dengan rata-rata 6 dengan persentase 38% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator partisipasi masyarakat sebanyak 19 dengan rata-rata 6 persentase 38%.

Berdasarkan hasil analisis kuisisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator partisipasi masyarakat bahwa responden

menilai Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir hasilnya **“Kurang Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PKK yang bernama ibu Anita Ismail pada tanggal 29 September 2020, Apakah masyarakat membeli produk dari PKK ?

Ia mengatakan bahwa :

*“Dalam hal ini masyarakat tidak membeli produk dari hasil kegiatan PKK bukan karena tidak mau atau apapun itu namun dikarenakan produk dari PKK itu belum dipasarkan dikarenakan keterbatasan kader yang mampu membuat dan mengolah produksi itu sendiri”*

Sebagai mana yang dikatan oleh salah satu kader PKK saat di wawancara dengan jawaban yang masih sama :

*“saat ini yang menyebabkan tidak dipasarkan produk dari PKK ini adalah anggaran yang tersedia tidak mencukupi dan begitu juga sumberdaya yang bisa mengelolah itu tidak memadai”*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih banyaknya kader-kader PKK yang masih pasif dan kesadarannya dalam berperan aktif pun masih kurang dalam kegiatan Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir .Untuk lebih jelasnya apa saja yang di observasi di lapangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.12 Hasil Observasi Tentang Kegiatan PKK di Kelurahan Pekan Arba**

No	Uraian	Keterangan
1	Nama kegiatan	Keberlanjutan
2	Waktu Kegiatan	Selasa, 29 September 2002
3	Tempat Kegiatan	Kediaman salah satu anggota PKK
4	Kader yang terlibat	16 kader PKK
5	Hasil Observasi	Peran lurah dan Ketua PKK sangat diperlukan dalam memotivasi kader yang pasif dan bisa juga membangun semangat kader-kader dalam kegiatan PKK

*Sumber : Observasi peneliti 2020*

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, Kuisisioner dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dinilai Kurang Baik dengan persentase 30% dari jumlah responden yang berjumlah 16 orang.

#### **4. Pengembangan modal social masyarakat**

Menurut sejumlah literatur, keberadaan aksi-aksi pembangunan alternatif antara lain melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk menyempurnakan keterbatasan dan kekurangan dari model pembangunan pro pertumbuhan cenderung bercorak simplistik. Salah satu indikasinya adalah penekanannya pada upaya-upaya akumulasi modal fisik (*physical capital*) secara sentralistik dan cenderung mengabaikan aspek keterkaitannya dengan kapital-kapital yang lain seperti modal alami (*natural capital*), modal manusia (*human capital*), dan modal sosial (*social capital*). Ketidaksinambungan antarkapital telah melahirkan multikritis dalam

pembangunan selamai ini. setelah dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden kemudian dilakukan pengumpulan aerta pengolahan data maka didapatkan jawaban responden penelitian mengenai indikator Pengembangan modal social masyarakat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.13 Penilaian Responden Unsur Kelurahan Tentang Indikator Pengembangan modal sosial masyarakat Pada Penelitian Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Saling percaya	1	3	1	5
2.	Kerjasama	1	4	0	5
3.	Kejujuran	2	2	1	5
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>15</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>Persentase</b>		<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 5 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 1 orang, cukup baik 3 orang dan yang menjawab kurang baik sebnayak 1 orang . selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 1 orang, cukup baik 4 orang dan yang jawaban kurang baik 0 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga responden yang menjawab baik 2 orang, cukup baik 2 orang dan kurang baik 1 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Pengembangan modal social masyarakat sebanyak 4 dengan rata-rata 1 dan persentase 20% sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator Pengembangan modal social masyarakat sebanyak 9 dengan rata-rata 3 dan persentase 60% sedangkan yang memberikan tanggapan

kurang baik terhadap indikator Pengembangan modal social masyarakat sebanyak 2 dengan rata-rata 1 dan persentase 20%.

Berdasarkan hasil analisis kuisisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator Pengembangan modal social masyarakat bahwa responden menilai Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ( studi tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Pekan Arba pada Tanggal 28 September 2020, peneliti mengajukan pertanyaan : Bagaimana hubungan kerja Kelurahan dan ketua PKK terjalin dalam kegiatan PKK ?

Ia mengatakan bahwa :

*“Di dalam kerjasama antara lurah dan ketua PKK maupun yang lainnya sangat baik apa lagi dalam menjalankan program uuntuk memajukan Kelurahan kami akan melkaukan kerjasama untuk mewujudkan Kelurahan yang lebih baik”*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan : Bagaimana kerjasama antar ketua dengan kader atau anggotanya dalam menjalnkan kegiatan PKK ?

Ia mengatakan bahwa :

*“untuk kerjasam antara ketua dengan kader-kadernya cukup baik yang mana selama ini kami melakukan kerjasama untuk mencapai proram-program yang telah ditetapkan”.*

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, Kuisisioner dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Peranan

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dinilai Cukup Baik dengan persentase 60% dari jumlah responden yang berjumlah 5 orang.

**Tabel V.14 Penilaian Responden Unsur PKK Tentang Indikator Pengembangan modal sosial masyarakat Pada Penelitian Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Saling percaya	9	4	3	16
2.	Kerjasama	6	7	3	16
3.	Kejujuran	3	10	3	16
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>48</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>6</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>16</b>
<b>Persentase</b>		<b>38%</b>	<b>44%</b>	<b>19%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 16 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 9 orang, cukup baik 4 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 3 orang . selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 6 orang, cukup baik 7 orang dan yang jawaban kurang baik 3 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga responden yang menjawab baik 3 orang, cukup baik 10 orang dan kurang baik 3 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Pengembangan modal sosial masyarakat sebanyak 18 dengan rata-rata 6 dan persentase 38% sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator Pengembangan modal sosial masyarakat sebanyak 21 dengan rata-rata 7 dan persentase 44% sedangkan yang

memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator Pengembangan modal sosial masyarakat sebanyak 9 dengan rata-rata 3 dan persentase 19%.

Berdasarkan hasil analisis kuisisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator Pengembangan modal sosial masyarakat bahwa responden menilai Penelitian Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PKK yang bernama Ibuk Anita Ismail Pada tanggal 29 September 2020, dengan pertanyaan, bagaimana tingkat kepercayaan antara lurah dengan kader PKK ?

Ia mengatakan bahwa :

*“Selama ini kami masih diberi kepercayaan penuh dalam menjalankan program PKK begitu juga dengan kader-kader yang lain bahwa ia juga diberi kepercayaan yang baik dari lurah untuk menjalankan program PKK”*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan : apakah ada laporan kegiatan PKK ?

Ia mengatakan bahwa :

*“Terkaitn dengan laporan itu ada yang biasa disebut laporan tahunan disana bias kita lihat bahwa kegiatan yang dilakukan PKK beserta juga ada dokumentasi sebagai bukti kegiatan”*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat terbatasnya kemampuan kader PKK tentang pemahaman pengisian administrasi

PKK sehingga akan menghambat keakuratan data kegiatan . Untuk lebih jelasnya apa saja yang di observasi di lapangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.15 Hasil Observasi Tentang Kegiatan PKK di Kelurahan Pekan Arba**

No	Uraian	Keterangan
1	Nama kegiatan	Pengembangan Modal sosial masyarakat
2	Waktu Kegiatan	Selasa, 29 September 2002
3	Tempat Kegiatan	Kediaman salah satu anggota PKK
4	Kader yang terlibat	16 kader PKK
5	Hasil Observasi	Perlunya pelatihan tentang administrasi terhadap anggota PKK agar tertib administrasi

*Sumber : Observasi peneliti 2020*

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, Kuisisioner dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dinilai Kurang Baik dengan persentase 44% dari jumlah responden yang berjumlah 16 orang.

### **5. Penghapusan ketimpangan gender**

Perbedaan posisi ekonomi menunjuk kepada peranan apa yang diletakkan pada orang, baik pria maupun wanita, dalam proses atau pekerjaan mencari nafkah dan pekerjaan rumah tangga (misalnya dengan norma: menurut kekuatan atau kecakapan bekerja masing-masing khususnya dalam pekerjaan mencari nafkah), yang umumnya erat terjalin dengan lain-lain fungsi. setelah dilakukan penyebaran kuisisioner kepada responden kemudian dilakukan penngumpulan aerta pengolahan data maka didapatkan jawaban responden penelitian mengenai indikator

Penghapusan ketimpangan gender, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.16 Penilaian Responden Unsur Kelurahan Tentang Indikator Penghapusan ketimpangan gender Pada Penelitian Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Memberi ketimpangan pada penghapusan	1	2	2	5
2.	Tidak ada perbedaan gender	0	3	2	5
3.	Pemberian tempat yang sama pada perempuan	2	3	0	5
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>Persentase</b>		<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 5 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 1 orang, cukup baik 2 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 2 orang . selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 0 orang, cukup baik 3 orang dan yang jawaban kurang baik 2 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga responden yang menjawab baik 2 orang, cukup baik 3 orang dan kurang baik 0 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Penghapusan ketimpangan gender sebanyak 3 dengan rata-rata 1 dan persentase 20% sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator Penghapusan ketimpangan gender sebanyak 8 dengan rata-rata 3 dan persentase 60% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik

terhadap indikator Penghapusan ketimpangan gender sebanyak 4 dengan rata-rata 1 dan persentase 20%.

Berdasarkan hasil analisis kuisisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator Penghapusan ketimpangan gender bahwa responden menilai Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Pekan Arba pada Tanggal 28 September 2020, peneliti mengajukan pertanyaan : Bagaimana pemberian tempat pada perempuan dalam kegiatan PKK ?

Ia mengatakan bahwa :

*“Dalam kegiatan PKK ini memang yang lebih dominan adalah usia yang lebih tua sekitar 45 keatas sedangkan 45 kebawah masih kurang aktif dalam kegiatan PKK”*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan : Apakah lurah memberikan solusi dan saran apa bila terjadinya masalah dalam kegiatan PKK ?

Ia mengatakan bahwa :

*“saya selaku lurah apa bila terjadi kendala kami akan mencarikan solusi yang terbaik namun yang saya lihat yang menjadi hambatannya dalam pelaksanaan posyandu dan kegiatan kemasyarakatan lainnya masih kurang mendapat dukungan dari perangkat RT dan RW dan masyarat.”*

**Tabel V.17 Penilaian Responden Unsur PKK Tentang Indikator Penghapusan ketimpangan gender Pada Penelitian Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Memberi ketimpangan pada penghapusan	7	6	3	16
2.	Tidak ada perbedaan gender	5	6	5	16
3.	Pemberian tempat yang sama pada perempuan	2	7	7	16
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>48</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
<b>Persentase</b>		<b>31%</b>	<b>44%</b>	<b>31%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 16 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 7 orang, cukup baik 6 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 3 orang . selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 5 orang, cukup baik 6 orang dan yang jawaban kurang baik 5 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga responden yang menjawab baik 2 orang, cukup baik 7 orang dan kurang baik 7 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Penghapusan ketimpangan gender sebanyak 14 dengan rata-rata 5 dan persentase 31% sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator Penghapusan ketimpangan gender sebanyak 19 dengan rata-rata 6 dan persentase 38% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator Penghapusan ketimpangan gender sebanyak 15 dengan rata-rata 5 dan persentase 31%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator Penghapusan ketimpangan gender bahwa responden menilai Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PKK yang bernama Ibuk Anita Ismail Pada tanggal 29 September 2020, dengan pertanyaan, bagaimana tanggapan ibu mengenai tidak adanya perbedaan gender ?

Ia mengatakan bahwa :

*“Dalam hak ini menurut saya kegiatan PKK yang dominan adalah perempuan laki-laki tidak terlibat dalam kegiatan PKK ini yang menyebabkan beberapa masyarakat tidak mendukung adanya kegiatan-kegiatan PKK”*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat dalam pelaksanaan posyandu dan kegiatan kemasyarakatan lainnya masih kurang mendapat dukungan dari perangkat RT dan RW kegiatan Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk lebih jelasnya apa saja yang di observasi di lapangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.18 Hasil Observasi Tentang Kegiatan PKK di Kelurahan Pekan Arba**

No	Uraian	Keterangan
1	Nama kegiatan	Penghapusan Ketimpangan Gender
2	Waktu Kegiatan	Selasa, 29 September 2002
3	Tempat Kegiatan	Kediaman salah satu anggota PKK
4	Kader yang terlibat	16 kader PKK
5	Hasil Observasi	Perlunya sosialisasi mengenai PKK dan Program yang berkaitan PKK agar RT dan RW serta masyarakat bisa mendukung dengan adanya program PKK

*Sumber : Observasi peneliti 2020*

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, Kuisisioner dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dinilai Kurang Baik dengan persentase 44% dari jumlah responden yang berjumlah 16 orang.

Namun dalam Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ( studi tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), masih ada terjadi hambatan-hambatan.

**Tabel V.19 Rekapitulasi Unsur Kelurahan Tanggapan Responden Penelitian Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penelitian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pengembnagan berbasis masyarakat	1	4	0	5
2.	Keberlanjutan	1	3	1	5
3.	Partisipasi masyarakat	1	2	3	5
4.	Pengembangan modal social masyarakat	1	2	1	5
5.	Penghapusan ketimpangan gender	1	3	1	5
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>25</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
	<b>Persentase</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Tabel diatas tentang Rekapitulasi Unsur Kelurahan menggambarkan pendapat responden terkait Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ( studi tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dari rekapitulasi data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata respoden yang berpendapat Baik yaitu sebanyak 5 atau jika dipersentasekan sebesar 20% dengan rata-rata 1, sedangkan cukup baik yaitu 14 atau jika dipersantesan sebesar 60% dengan rata-rata 3, sedangkan kurang baik yaitu 6 atau jika dipersentasekan sebesar 20% dengan rata-rata 1.

Dari hasil analisis data yang dilakukan yang terlihat dalam tabel V.14 pada indikator Pengembnagan berbasis masyarakat rata-rata respoden memberikan jawaban baik sebanyak 1 tanggapan, cukup baik 4 tanggapan dan kurang baik 0 tanggapan. Sementara itu untuk indikator Keberlanjutan rata-rata respoden

memberikan jawaban baik sebanyak 1 tanggapan, cukup baik 3 tanggapan, kurang baik 1 tanggapan, indikator Partisipasi masyarakat rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 1 tanggapan, cukup baik sebanyak 2 tanggapan, kurang baik 3 tanggapan, untuk indikator Pengembangan modal social masyarakat rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 1 tanggapan, cukup baik sebanyak 2 dan kurang baik sebanyak 1 tanggapan, untuk indikator Penghapusan ketimpangan gender kat rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 1 tanggapan, cukup baik sebanyak 3 dan kurang baik sebanyak 1 tanggapan.

Maka dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ( studi tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dikategori **“Cukup Baik”**. Karena dapat dilihat berdasarkan jumlah keseluruhan tanggapan responden yakni cukup baik dengan nilai tertinggi 14 tanggapan dibandingkan kurang baik dengan nilai 6 dan baik 5 tanggapan. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan-hambatan Kelurahan dalam Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ( studi tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

**Tabel V.20 Rekapitulasi Unsur PKK Tanggapan Responden Penelitian Penelitian Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penelitian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pengembnagan berbasis masyarakat	6	8	2	16
2.	Keberlanjutan	6	7	3	16
3.	Partisipasi masyarakat	4	6	6	16
4.	Pengembangan modal social masyarakat	6	7	3	16
5.	Penghapusan ketimpangan gender	5	6	5	16
	<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>80</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
	<b>Persentase</b>	<b>31%</b>	<b>44%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Tabel diatas tentang Rekapitulasi Unsur Masyarakat menggambarkan pendapat responden terkait Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir dari rekapitulasi data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata respoden yang berpendapat Baik yaitu sebanyak 21 atau jika dipersentasekan sebesar 25% dengan rata-rata 5, sedangkan cukup baik yaitu 38 atau jika dipersantesan sebesar 50% dengan rata-rata 10, sedangkan kurang baik yaitu 21 atau jika dipersentasekan sebesar 25% dengan rata-rata 5.

Dari hasil analisis data yang dilakukan yang terlihat dalam tabel V.13 pada indikator Akuntabilitas rata-rata respoden memberikan jawaban baik sebanyak 6 tanggapan, cukup baik 9 tanggapan dan kurang baik 5 tanggapan. Sementara itu untuk indikator transparansi rata-rata respoden memberikan jawaban baik sebanyak 4 tanggapan, cukup baik 11 tanggapan, kurang baik 5 tanggapan,

indikator partisipasi rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 7 tanggapan, cukup baik sebanyak 9 tanggapan, kurang baik 4 tanggapan, untuk indikator pengentasan kemiskinan rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 4 tanggapan, cukup baik sebanyak 9 dan kurang baik sebanyak 7 tanggapan.

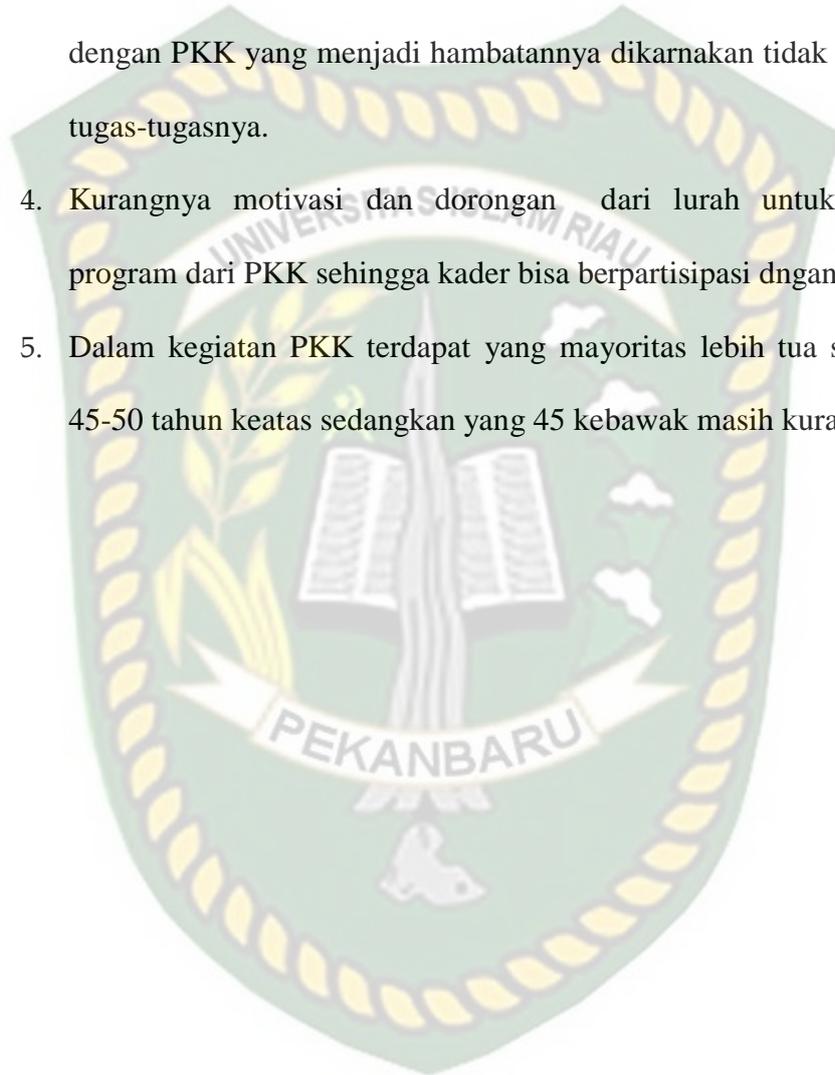
Maka dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ( studi tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dikategori **“Cukup Baik”**.

Karena dapat dilihat berdasarkan jumlah keseluruhan tanggapan responden yakni cukup baik dengan nilai tertinggi 34 tanggapan dibandingkan baik dengan nilai 27 dan kurang baik 19 tanggapan. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan-hambatan pemerintahan desa dalam Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ( studi tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

**C. Hambatan-hambatan yang di hadapi Penelitian Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

1. Pengembangan berbasis masyarakat atau memanfaatkan potensi yang ada demi perbaikan kualitas hidup masyarakat, namun masyarakat tidak memanfaatkan Program PKK untuk pengembangan diri dikarenakan tidak memahami mengenai kegiatan yang diadakan dalam PKK.

2. Tidak adanya program PKK yang bisa dijadikan kegiatan keberlanjutan untuk generasi mendatang.
3. Kurangnya partisipasi kader-kader dalam kegiatan yang berhubungan dengan PKK yang menjadi hambatannya dikarenakan tidak memahami tugas-tugasnya.
4. Kurangnya motivasi dan dorongan dari lurah untuk mencapai program dari PKK sehingga kader bisa berpartisipasi dengan baik.
5. Dalam kegiatan PKK terdapat yang mayoritas lebih tua sekitar usia 45-50 tahun keatas sedangkan yang 45 kebawah masih kurang.



## BAB VI

### PENUTUP

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Penelitian Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu dengan didukung oleh data-data yang ada, maka penulis dapat menyusun beberapa kesimpulan senagai berikut :

1. Hasil Penelitian Mengenai Peran Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Studi Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam kategori **Cukup Baik**.
2. Faktor yang menjadi hambatan dari Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ( studi tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) diantara lain :
  - a) Hambatan Dalam Pengembanagan berbasis masyarakat masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya program PKK.
  - b) Masih keterbatasan dukungan anggaran dikarenakan mengingat keterbatasan anggaran Kelurahan dalam pembinaan PKK
  - c) Banyaknya kader-kader PKK yang masih fasip dan kesadarannya dalam berperan aktif pun masih kurang

- d) Hambatan dalam terbatasnya kemampuan kader PKK tentang pemahaman pengisian administrasi PKK sehingga akan menghambat keakuratan data kegiatan
- e) Dalam pelaksanaan posyandu dan kegiatan kemasyarakatan lainnya masih kurang mendapat dukungan dari perangkat RT dan RW

#### **B. Saran**

Setelah penulis memahamiscara mendalam mengenai permasalahan yang ada dalam judul Peranan Lurah Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ( studi tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), maka ada beberapa saran yang disimpulkan dari hasil penelitian ini :

1. Diperlukan pertahatian dan komitmen dari semua pihak baik pemerintah, swasta dan masayarakat untuk terlaksannya program PKK.
2. Diharapkan kepala lurah dan ketua PKK terus memberikan motivasi dan dorongan agar kader PKK memiliki semangat dalam berpartisipasi.
3. Perlunya sosialisasi terkait PKK dan programnya agar RT DAN RW serta masyarakat bisa mendukung dengan adanya program PKK.
4. Untuk memperoleh administrasi akurat perlunya pelatihan untuk kader-kader agar mereka memilki kemampuan dalam adminitrasi
5. Disarankan keapada Ketua PKK dan kadernya agar bisa mengembangkan produksinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Friedman, J. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge, USA: Blackwell Publishers.
- Hatu, Ni'matul. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media
- Istianto, Bambang. 2009. *Manajemen Pemerintahan Dalam Persepektif Pelayanan Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Malayu S.P. Hasibuan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Erlangga Bumi Aksara.
- Mardikanto. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Merson. 1995. *Manajemen Personalia; Teknik dan Konsep Modern*. Jakarta: Erlangga Bumi Aksara.
- Miftah Toha. 2007. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Musanef. 1982. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung
- Munaf. 2016. *Pemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Muhadam Labolo. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ndraha Taliziduhu. 2003. *Teori Budaya Organisasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustak
- Rasyid, M. Ryaas. 2002. *Makna Pemerintahan*. Jakarta : Yarsif Watampone.

- Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja* Bandung: Mandar Maju
- Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sri Soemantri. 1976. *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara Asean*. Bandung: Tarsito
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama
- Syafii, Inu Kencana. 2005. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Bandar
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Utrecht. 1986. *Hukum Pidana 1*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

## B. Jurnal

- Aryati Wulandari (2018) Peranan pemberdayaan PKK dalam pemberdayaan keterampilan masyarakat Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan
- Komang Ayu Kusuma Wardani (2015) Peranan kepemimpinan Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar)
- Ramandita Shalfiah (2013) judul Peranan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam mendukung program-program pemerintah Kota Bontang

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan

Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan

